

**PENGARUH KUALITAS DIPA (DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN)
DAN AKURASI PERENCANAAN KAS TERHADAP KUALITAS
PENYERAPAN ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

M. ILHAM KHOLID

NIM. 0502173460



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2021

**PENGARUH KUALITAS DIPA (DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN)
DAN AKURASI PERENCANAAN KAS TERHADAP KUALITAS
PENYERAPAN ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah*

Oleh :

M. ILHAM KHOLID

NIM. 0502173460

Program Studi :

AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul :

**Pengaruh Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan Akurasi
Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan**

Oleh :

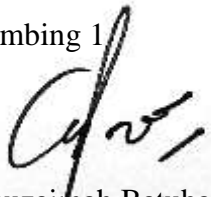
M. Ilham Kholid

NIM. 0502173460

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 07 Mei 2021

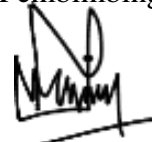
Pembimbing 1



Dr. Chuzaimah Batubara, MA

NIDN. 2006077002

Pembimbing 2

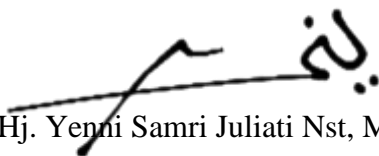


Nurwani, M.Si

NIDN. 0126038901

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, M.A

NIDN. 2001077903

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Ilham Kholid
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 02 Februari 1999
NIM : 0502173460
Program Studi : (S1) Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Jl. Selamat Gg. Buya No. 15 Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan”** adalah benar karya asli saya atau penelitian saya dan bukan karya orang lain, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 11 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan



M. Ilham Kholid

NIM. 0502173460

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “PENGARUH KUALITAS DIPLOMA (DAFTAR ISI DAN PELAKSANAAN ANGGARAN) DAN AKURASI PERENCANAAN KAS TERHADAP KUALITAS PENYERAPAN ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN” atas Nama M. Ilham Kholid, NIM 0502173460, Program Studi Akuntansi Syariah telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 29 Juli 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 04 Agustus 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Akuntansi Syariah

Ketua,



Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA
NIDN. 2001077903

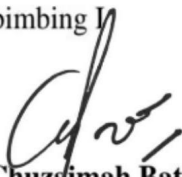
Sekretaris,



Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIDN. 2010057302

Anggota

Pembimbing I



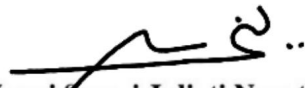
Dr. Chuzaimah Batubara, MA
NIDN. 2006077002

Pembimbing II



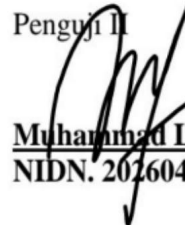
Nurwani, M.Si
NIDN. 0126038901

Penguji I



Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA
NIDN. 2001077903

Penguji II



Muhammad Lathief Ilhamy Nst, M.E.I
NIDN. 2026048901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

M. Ilham Kholid (2021), “Pengaruh Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan” dibawah bimbingan Dr. Chuzaimah Batubara, MA sebagai Pembimbing Skripsi I dan Nurwani, M.Si sebagai Pembimbing Skripsi II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan Akurasi Perencanaan Kas Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan asosiatif, teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner serta populasi dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 80 orang pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Data dianalisis dengan metode regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran secara parsial sedangkan Akurasi Perencanaan Kas berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran secara parsial. Dan hasil dari hipotesis menunjukkan bahwa Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan Akurasi Perencanaan Kas berpengaruh terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran secara simultan.

Kata Kunci : Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), Akurasi Perencanaan Kas, Kualitas Penyerapan Anggaran

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Selama penyusunan skripsi penulis banyak memperoleh bantuan dan dukungan yang sangat berharga berupa motivasi, bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih khususnya yang Teristimewa kepada kedua orang tua saya yang sangat saya kagumi dan cintai Ayahanda ST. Zainul Pili dan Ibunda Lamini Tanjung yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, doa, dan nasihat serta semangat yang tulus hingga saat ini, kemudian Terima kasih kepada Kakak-kakak dan Abang tersayang Martini Tanjung, S.H.I, S.Pd.I, Yanti Chasanova, S.Pd.I, Ishak Ali Muda, S.Pd.I, M.Pd, M.Psi dan Putri Salbiah, SS yang telah memberikan doa dan semangat serta dukungan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Serta penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Marliyah, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Bapak Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, S.H.I, M.A selaku ketua jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Bapak Hendra Harmain, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Chuzaimah Batubara, MA selaku dosen Pembimbing I skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan serta saran-saran dari awal penyusunan skripsi sampai dengan selesai.
9. Ibu Nurwani, M.Si selaku dosen Pembimbing II skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan serta saran-saran dari awal penyusunan skripsi sampai dengan selesai.
10. Terima kasih kepada seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang luar biasa serta membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan.
11. Terima kasih kepada Wahyul Huda Nanda Sahabat terbaik ku dan seperjuangan satu visi dan misi yang luar biasa serta sahabat seperjuanganku yang memotivasi ku tentang kehidupan dan tetap setia menemani di kala susah dan senang yang telah memberikan dukungan motivasi, semangat serta doanya dan yang tak bosan-bosannya menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Terima kasih kepada Muhammad Hafzhan (Azhan Abang India) kawan awak kembarannya Sidhart Malhotra dan Sharukh Khan yang selalu memberikan nasihat-nasihat terbaiknya dan motivasinya kepada penulis serta juga menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Jodohku yang sedang Allah persiapkan. Kamu adalah salah satu alasan kenapa skripsi ini harus selesai tepat waktu karena tahap ini membuatku selangkah lebih dekat denganmu, semoga dipertemukan di waktu yang tepat.
14. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar organisasi ku mulai dari Economic English Arabic Rabbani (E2AR), Ikatan Keluarga Mahasiswa Minang UINSU, dan juga kepada keluarga besar Generasi Baru Indonesia (GenBI) Komisariat UINSU & GenBI Sumut.
15. Terima kasih kepada teman-teman Magang BPKAD Kota Medan : Wahyul, Zuhair, Azhan, Reza, dan Irfan
16. Terima kasih kepada teman dekat ku ketika KKN di Pakpak Bharat : Sekar, Mahleni Pohan, dan Hadi yang selalu memberikan semangatnya kepada penulis.
17. Terima kasih kepada keluarga besar KKN Kelompok 13 Desa Kuta Dame, Kec. Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat yang ketua KKN nya selalu kesal dengan anggotanya terima kasih telah kebersamaan selama 1 bulan lamanya menyelesaikan satu dari tiga tri darma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.
18. Kepada Vidairotul Hamdiah temanku yang dari Subulussalam yang sangat baik hati dan ramah yang selalu menyemangati dalam penulisan skripsi ini.
19. Terima kasih kepada kakak-kakak tentor ku Befiriana Moniza, S.Akun dan Indah Sindiana, S.Akun, dan Bang Hary Anugerah Irawan yang sudah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Terima kasih kepada seluruh staf pegawai yang ada di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang sudah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan riset dan juga magang.

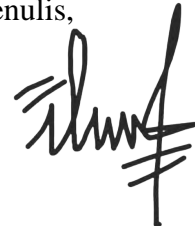
21. Kepada Pazlinna Dewi teman ku dari SD hingga Kuliah yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
22. Kepada seluruh teman-teman Akuntansi Syariah A (AKS-A) Stambuk 2017 yang sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi.
23. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis yang mendukung serta banyak membantu penulis mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan skripsi ini.

Semoga semua bantuan, bimbingan, arahan serta doa yang diberikan kepada penulis dapat dinilai ibadah oleh Allah SWT dan mendapat Ridho-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, akhir kata penulis ucapkan Terima Kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, 16 Mei 2021

Penulis,



M. ILHAM KHOLID

NIM. 0502173460

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Perumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORITIS	11
A. Kajian Teoritis	11
1. Kualitas Penyerapan Anggaran.....	11
a. Pengertian Penyerapan Anggaran	11
b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Penyerapan Anggaran	14
c. Optimalisasi Penyerapan Anggaran	18
d. Prinsip Penyusunan APBD	19
e. Struktur APBD dan Kode Rekening	21
f. Arti Penting dan Unsur Kualitas Penyerapan Anggaran.....	23
g. Anggaran Menurut Perspektif Islam	24
2. Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).....	30
a. Pengertian DIPA	30
b. Jenis-Jenis DIPA	32
c. Pokok-pokok Materi DIPA	35

3. Akurasi Perencanaan Kas	41
a. Pengertian Perencanaan Kas	41
4. Pengaruh Kualitas DIPA Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran.....	44
5. Pengaruh Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran	44
6. Analisis Akuntansi Syariah dan Anggaran	46
B. Penelitian Sebelumnya	49
C. Kerangka Konseptual	57
D. Hipotesa	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	59
A. Pendekatan Penelitian.....	59
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	59
1. Lokasi Penelitian	59
2. Waktu Penelitian	59
C. Populasi dan Sampel.....	60
1. Populasi.....	60
2. Sampel	61
D. Data Penelitian.....	62
1. Jenis Data	62
2. Sumber Data	62
E. Teknik Pengumpulan Data	62
F. Definisi Operasional Variabel	63
G. Teknik Analisis Data	66
1. Analisis Deskriptif	66
2. Uji Kualitas Data	66
3. Uji Asumsi Klasik.....	68
4. Analisis Regresi Linear Berganda	70
5. Uji Hipotesis	70

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	73
A. Hasil Penelitian	73
1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Medan.....	73
a. Geografi dan Demografi	73
b. Lambang Kota Medan.....	75
c. Visi dan Misi	76
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.....	77
a. Sejarah Singkat.....	77
b. Tugas Pokok dan Fungsi	81
3. Deskripsi Data Penelitian Geografi dan Demografi	82
4. Uji Kualitas Data	87
5. Uji Asumsi Klasik.....	94
6. Uji Analisis Regresi Linear Berganda	98
7. Uji Hipotesis	100
B. Pembahasan.....	104
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur APBD.....	21
Tabel 2.2	Tabel Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Islam	29
Tabel 3.1	Waktu Penelitian.....	64
Tabel 3.2	Daftar Jumlah Pegawai	65
Tabel 3.3	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	68
Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	82
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan	82
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Divisi Bagian Pekerjaan	83
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia	85
Tabel 4.5	Statistik Deskriptif	86
Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas DIPA (X1)	87
Tabel 4.7	Hasil Uji Validitas Variabel Akurasi Perencanaan Kas (X2)	89
Tabel 4.8	Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Penyerapan Anggaran (Y)	90
Tabel 4.9	Hasil Uji Reliabilitas.....	92
Tabel 4.10	Hasil Uji Normalitas	96
Tabel 4.11	Hasil Uji Multikolinearitas	97
Tabel 4.12	Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	99
Tabel 4.13	Hasil Uji t.....	100
Tabel 4.14	Hasil Uji F.....	102
Tabel 4.15	Uji Model R^2	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kode Rekening.....	23
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	62
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas dengan Normal <i>P-Plot</i>	94
Gambar 4.2 Histogram.....	95
Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas dengan <i>Scatter Plot</i>	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis meliputi seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa anggaran merupakan kerja (*output*) terutama berupa taksiran-taksiran yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Karena anggaran merupakan hasil kerja (*output*), maka anggaran dituangkan dalam suatu naskah tulisan yang disusun secara teratur dan sistematis. Sedangkan proses dan metode untuk mempersiapkan suatu anggaran disebut penganggaran.¹ Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja/lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat, penyerapan anggaran, pengawasan anggaran, dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Tahapan penyerapan anggaran ini diimulai ketika Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR, dalam rangka terjadinya kesatuan pemahaman serta kesatuan langkah dalam pelaksanaan, pemerintah sebagai pelaksana dari UU APBN selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN. Pada saat ini Keppres yang berlaku adalah Keppres Nomor 42

¹ Arfan Ikhsan et al., *Akuntansi Sektor Publik* (Medan: Madenatera, 2018). h. 54

Tahun 2002.² Penyerapan anggaran juga merupakan salah satu tolok ukur kinerja pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian dan menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 249/PMK.02/2011 pasal 4 ayat 2, yaitu evaluasi kinerja atas aspek implementasi dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran.

Penyerapan anggaran sangat penting karena akan menggerakkan perekonomian sektor riil, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Hambatan-hambatan yang ada juga perlu di atasi, misalnya dengan mempercepat proses tender dan melakukan soliditas program bagi pemkab/pemko. Pemkab dan pemko perlu mensinkronkan dan mensinergikan program agar bisa berjalan dengan baik terkait penggunaan APBN dan APBD. Pemkab dan Pemko juga diharapkan mampu menghilangkan hambatan investasi agar mendorong pertumbuhan ekonomi. Masyarakat juga diharapkan berpartisipasi dan mendukung terserapnya anggaran, di antaranya dengan melibatkan diri dalam program pembangunan. Misalnya saja dalam pembangunan jalan, jembatan dan lainnya. Masyarakat diharapkan mendukung pembangunan jalan baik berupa menghibahkan lahan maupun dengan menjualnya dengan harga yang wajar.³

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran. Salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Kualitas DIPA dapat dikatakan sebagai hal yang sangat penting, karena DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Penyusunan DIPA 2020 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang

² Egiastyo Dwi Kuncoro, "Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi Sipp Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Dinas Pu Prov," *Kaltim. E-Journal Administrasi Bisnis* 1, no. 4 (2013): 364–373.

³ Irwan Prayitno, "Pentingnya Penyerapan Anggaran," Diunduh Pada September 19, 2020, <https://irwanprayitno.wordpress.com/2012/01/04/pentingnya-penyerapan-anggaran/>.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.⁴ Berdasarkan hasil survey penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan menunjukkan bahwa aspek dokumen pelaksanaan anggaran merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran. Hal ini juga didukung oleh pendapat dari Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi laju penyerapan anggaran adalah dokumen DIPA yang masih memerlukan revisi. Ketidaktepatan dalam perencanaan atau penyusunan anggaran mengakibatkan perlunya tindakan revisi terhadap DIPA. Revisi DIPA ini akan mempengaruhi penyerapan anggaran karena jadwal kegiatan harus diubah sehingga waktu pelaksanaan menjadi mundur dan akhirnya terjadi sisa anggaran yang tidak sempat lagi digunakan pada akhir tahun. Selain itu, jika dilakukan revisi maka kegiatan dan program belum dapat dilaksanakan sampai dengan persetujuan atas revisi turun.

Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran. Rancangan DIPA berisi sasaran yang hendak dicapai, program dan kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, rencana penarikan dana tiap-tiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta Pendapatan yang diperkirakan.⁵ Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011 DIPA Pasal 1 ayat (2) menjelaskan: “Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang berisi data dan uraian seluruh kegiatan yang akan dilakukan beserta alokasi anggarannya, dan merupakan dasar bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

⁴ Kemenkeu RI Ditjen Perbendaharaan, “Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Serta Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2020,” accessed September 19, 2020, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/papubarat/id/data-publikasi/berita-terbaru/2886-penyerahan-daftar-isian-pelaksanaan-anggaran-dipa-serta-daftar-alokasi-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-tkdd-tahun-anggaran-2020>.

⁵ Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati, *Akuntansi Pemerintahan* (Jakarta: Salemba Empat, 2012). h. 88

Anggaran untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara”. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat pertimbangan-pertimbangan lanjutan terhadap DIPA (misalnya perubahan program, perubahan jenis belanja, dan lain-lain), maka DIPA tersebut bisa direvisi. Dasar hukum revisi DIPA adalah Peraturan Menteri Keuangan, dan petunjuk teknis atas revisi DIPA adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, yang berbeda-beda untuk tiap-tiap tahun anggaran. Berdasarkan pembagian anggaran dalam APBN, jenis DIPA dapat dikelompokkan atas DIPA Kementerian Negara/Lembaga dan DIPA Bendahara Umum Negara. DIPA kementerian negara/lembaga dapat dikategorikan menjadi, yaitu yang pertama DIPA satker Pusat, adalah DIPA yang dikelola oleh satker kantor pusat dan atau satker pusat suatu K/L, termasuk didalamnya DIPA satker Badan Layanan Umum, dan DIPA satker Non Vertikal Tertentu, yang kedua DIPA satker vertikal (Kantor Daerah), adalah DIPA yang dikelola oleh kantor/instansi vertikal Kementerian/Lembaga di daerah termasuk di dalamnya untuk DIPA Badan Layanan Umum, yang ketiga DIPA Dana Dekonsentrasi, adalah DIPA dalam rangka pelaksanaan dana dekonsentrasi, yang dikelola oleh satker perangkat daerah Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur, yang keempat DIPA Tugas Pembantuan, adalah DIPA dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Menteri/pimpinan lembaga berdasarkan usulan kepala daerah, dan yang kelima DIPA Urusan Bersama, adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan Urusan Bersama, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga berdasarkan usulan daerah.⁶

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran adalah akurasi perencanaan kas. Akurasi perencanaan kas merupakan suatu bagian penting dalam upaya percepatan penyerapan anggaran karena dengan adanya perencanaan kas

⁶ Ditjen Perbendaharaan, *Hasil Monitoring Dan Evaluasi Hal-Hal Yang Mempengaruhi Dalam Penyerapan Anggaran* (Jakarta: Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, 2011). h. 32

yang baik dan akurat akan memastikan tersedianya dana untuk membiayai kegiatan pemerintah. Hal ini tentunya dapat mencegah kemungkinan terhambatnya suatu kegiatan akibat dari tidak tersedianya dana. Hal ini sejalan dengan hasil *workshop* Perencanaan Kas yang diadakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Direktorat Transformasi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. *Workshop* ini menyimpulkan bahwa semakin meningkatnya akurasi perencanaan kas maka semakin baik kualitas penyerapan anggaran. Peningkatan akurasi perencanaan kas dapat berdampak pada penyerapan anggaran yang proporsional, tidak terjadi penumpukan pencairan dana di akhir tahun.⁷

Perencanaan kas merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan best practices pengelolaan/manajemen kas untuk mengidentifikasi kebutuhan kas dimasa-masa yang akan datang, sehingga kepastian untuk penyediaan kas sesuai kebutuhan dan penggunaan/optimalisasi kas dapat terwujud. Sesuai dengan PMK nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas, satker wajib menyampaikan Rencana Penarikan Dana Harian atas rencana pengajuan setiap Surat Perintah Membayar yang nilainya masuk dalam kriteria transaksi.⁸ Tingkat akurasi penarikan dana yang rendah akan menyebabkan penumpukan pada anggaran yang tidak dicairkan tepat pada waktunya. Hal ini terjadi karena satker tidak mempunyai pedoman yang tepat mengenai kapan anggaran belanja seharusnya direalisasikan/dicairkan. Apabila tingkat akurasi penarikan dana yang rendah ini dibiarkan terjadi berlarut-larut maka akan mendorong terjadinya masalah penyerapan anggaran yang terkonsentrasi pada akhir tahun dimana satker berupaya mencairkan seluruh pagu dana yang tercantum dalam DIPA.⁹

Di dalam penelitian ini, penulis memilih di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan sebagai objek penelitian. Kota Medan merupakan salah

⁷ Kementerian Keuangan RI, "Reformasi Pengelolaan Kas Di Indonesia : Kas, Dari Administrasi Pengelolaan, Menuju Secara, Kas" (2014).

⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2009). h. 14

⁹ J Dodik Haryanto and Adithya Bayu Wihascaryo, "Evaluasi Penerapan Perencanaan Kas Di Tingkat Satuan Kerja," *Jakarta: Sub Bagian Pengembangan Sekretariat Direktorat Jenderal perbendaharaan* (2011).

satu kota terbesar ke-3 di Indonesia. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang mampu sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional guna pengawasan dan akuntabilitas, kualitas, serta penyusunan pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah.

Fenomena yang terjadi pada saat ini terlihat dari kualitas penyerapan anggaran Pemerintah Kota Medan yang masih perlu ditingkatkan lagi. Karena hal ini dikarenakan Menjelang akhir 2019, serapan anggaran di Pemerintah Kota (Pemko) Medan, terhitung Januari hingga Oktober 2019, baru terealisasi hanya 47 persen dari APBD 2019 sebesar Rp6,3 triliun. Meskipun demikian, Kepala BPKAD Kota Medan ini optimis sebelum akhir tahun serapan anggaran terealisasi 100 persen. Ketika ditanya kendalanya apa, orang nomor satu di BPKAD Kota Medan itu mengatakan, 47 persen baru terealisasi, kemungkinan besar untuk penghematan anggaran. Namun, demikian, diharapkan semua Organisasi Perangkat Daerah segera membuat laporan keuangannya yang telah digunakan. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan mengimbau kepada seluruh pejabat Pemko Medan untuk tidak takut menggunakan anggaran. Sebab, anggaran yang sudah ditetapkan itu harus dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Selain instruksi untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dan proyek, seluruh Organisasi Perangkat Daerah juga harus memperhatikan kualitas pengerjaan. Jangan sampai, hanya karena mengejar target penyerapan, aspek kualitas justru dikesampingkan.¹⁰ Disamping itu Pemerintah Kota Medan sudah memiliki situs atau *website* yang dapat diakses pada alamat <https://pemkomedan.go.id> dan juga khususnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan juga telah memiliki *website* yang dapat diakses pada

¹⁰ Mistar, "Serapan Anggaran Pemko Medan Baru 47 Persen," accessed September 19, 2020, <https://www.mistar.id/medan/serapan-anggaran-pemko-medan-baru-47-persen/>.

alamat <http://bpkad.pemkomedan.go.id>. Diluncurkannya *website* resmi tersebut bertujuan untuk semakin terbukanya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus menjembatani komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat luas. Masalah lain yang terjadi adalah laporan keuangan ataupun laporan realisasi anggaran yang masih cenderung dianggap sebagai dokumen rahasia sehingga publikasi atas laporan keuangan ataupun laporan realisasi anggaran dimaksud, melalui internet surat kabar atau pun akses publik lainnya belum menjadi hal yang umum untuk dilaksanakan dan belum mampu menyediakan semua informasi keuangan secara terbuka kepada publik.

Beberapa penelitian terdahulu memiliki hasil yang konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Suwito (2017) dengan judul Pengaruh Kualitas Dipa Dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Satker-Satker Di Wilayah Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas DIPA dan akurasi perencanaan kas berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran satker-satker di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ratih dan Helmy (2013) dengan judul penelitian Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Satker Wilayah KPPN Malang menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas DIPA berpengaruh positif terhadap kualitas penyerapan anggaran, baik dari segi tingkat penyerapan anggaran maupun proporsionalitas penyerapan anggaran antar periode. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan bahwa akurasi perencanaan kas tidak berpengaruh terhadap kualitas penyerapan anggaran baik dari segi tingkat penyerapan anggaran maupun proporsionalitas penyerapan anggaran antar periode.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2019, penyerapan anggaran di Pemerintah Kota (Pemko) Medan, terhitung Januari hingga Oktober, baru terealisasi hanya 47 persen dari APBD 2019 sebesar Rp6,3 triliun.
2. Laporan Keuangan atau pun laporan realisasi anggaran cenderung masih dianggap dokumen rahasia sehingga publikasi atas laporan keuangan yang dimaksud, melalui internet, surat kabar, atau pun akses publik lainnya belum menjadi hal yang umum untuk dilaksanakan dan belum mampu menyediakan semua informasi keuangan secara terbuka kepada publik.

C. Batasan Masalah

Penulisan ini lebih difokuskan mengenai Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan Akurasi Perencanaan Kas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat mengenai latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) berpengaruh terhadap kualitas penyerapan anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan secara signifikan?
2. Apakah akurasi perencanaan kas berpengaruh terhadap kualitas penyerapan anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan secara signifikan?
3. Apakah Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), dan akurasi perencanaan kas berpengaruh terhadap kualitas penyerapan anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan secara simultan?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) terhadap kualitas penyerapan anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
- b. Untuk mengetahui pengaruh akurasi perencanaan kas terhadap kualitas penyerapan anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
- c. Untuk mengetahui pengaruh kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan akurasi perencanaan kas terhadap kualitas penyerapan anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan secara simultan.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna dan memiliki manfaat anatara lain sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan dan wawasan mengenai hal-hal yang mempengaruhi kualitas penyerapan anggaran serta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dalam menyusun penelitian untuk mencapai hasil yang diharapkan.

b. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aser Daerah Kota Medan

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi, pertimbangan dan evaluasi bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan bahwa pentingnya kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan akurasi perencanaan kas untuk mengingatkan atau memaksimalkan kualitas penyerapan anggaran.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah sumber pustaka di bidang ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai

bahan referensi dan representatif khususnya yang berhubungan dengan kualitas penyerapan anggaran bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Kualitas Penyerapan Anggaran

a. Pengertian Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran adalah realisasi perkiraan yang akan direalisasikan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan jangka waktu tertentu (realisasi anggaran). Pada organisasi sektor publik atau entitas pemerintah, penyerapan anggaran diartikan sebagai belanja atau realisasi anggaran yang dijabarkan dalam laporan realisasi anggaran (LRA) dalam kurun waktu tertentu. Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dalam siklus anggaran, dimulai dari perencanaan anggaran, pengaturan anggaran dan persetujuan DPR, penyerapan anggaran, pemantauan anggaran, dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Saat DPR mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU), tahap penyerapan anggaran ini dimulai. Dalam rangka terjadinya kesatuan pemahaman serta kesatuan langkah dalam pelaksanaan, pemerintah sebagai pelaksana dari UU APBN selanjutnya menerbitkan keputusan Presiden (Keppres) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN. Pada saat ini Keppres yang berlaku adalah Keppres nomor 42 tahun 2002.¹¹

Proses penyerapan APBN adalah proses dimana kegiatan-kegiatan yang telah dirinci dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau DPA masing-masing Satuan Kerja dilaksanakan, dan pembayarannya dilakukan kepada yang berhak, atau dengan kata lain telah terjadi pengeluaran negara. Pengeluaran negara sendiri dapat diartikan sebagai uang yang keluar dari kas negara. Menurut Lubis (1997:3) dalam Shenny

¹¹ Irma Aldina, "Pengaruh Kualitas Dipa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris Pada SKPD Di Kota Padang)," *Jurnal Akuntansi* 4, no. 1 (2017): 4.

(2012), mengatakan efektivitas penyerapan anggaran lebih menekan pada pencapaian segala sesuatu yang dilaksanakan berdaya guna yang berarti tepat, cepat, hemat, dan selamat. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1) Tepat

Tepat artinya apa yang dikehendaki tercapai kena sasaran memenuhi target, apa yang diinginkan menjadi realitas. Selain itu, kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas/pekerjaan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan/ditetapkan sebelumnya. Sehingga tidak ditemui adanya tugas/pekerjaan yang masih terlambat penyelesaiannya. Tepat disini lebih menekankan pada memenuhi target dan rencana yang terwujud.

2) Cepat

Cepat artinya pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sebelum waktu yang ditetapkan. lebih menekankan pada pekerjaan selesai sebelum waktu yang ditetapkan dan pekerjaan selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan.

3) Hemat

Hemat artinya tanpa terjadi pemborosan dalam bidang apapun dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan tersebut. Lebih menekankan pada tidak terjadi pemborosan dan pengalokasian anggaran sebanding dengan hasil (output) yang dirasakan oleh pengguna anggaran.

4) Selamat

Selamat artinya tanpa mengalami hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan kegagalan sebagian atau seluruh usaha pencapaian tujuan. Lebih menekankan pada tidak adanya kendala atau hambatan yang dialami dalam penyusunan anggaran.¹²

¹² *Ibid.*

Beberapa faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran tersebut antara lain :

- a) Adanya revisi dalam DIPA karena tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- b) Adanya keterlambatan penerimaan petunjuk teknis mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c) Adanya keterlambatan penetapan PPK dan pelaksana kegiatan.
- d) Adanya perubahan peraturan yang menyebabkan perbedaan persyaratan pencairan.
- e) Adanya pengunduran jadwal pengadaan barang dan jasa.
- f) Adanya rekanan yang tidak mengambil uang muka atau termin pembayaran.
- g) Adanya jadwal pengadaan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.¹³

Dalam pengelolaan anggaran, kejujuran (*shidq*) tersebut adalah suatu kewajiban, yang tidak bisa dijalankan kecuali dengan penerapan prinsip trans-paransi anggaran. Oleh karena itu berdasarkan kaidah tersebut maka, melakukan transparansi anggaran adalah wajib. Perilaku jujur (*shidq*) tercantum dalam Al-Qur'an Surah Maryam ayat 41 dan yang berbunyi :

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا

Artinya : “Dan ceritakanlah (Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Kitab (Al-Qur'an), sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan, seorang Nabi.”

Ayat tersebut juga sangat berkaitan dengan sifat *amanah* yang tercantum juga dalam Al-Qur'an Surah Al-Qashash ayat 26

¹³ Muhrom Ali Rozai Lilik Subagiyo, “Optimalisasi Penyerapan Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Organisasi (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Boyolali),” *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia* 9, no. 1 (2015). h. 75

قَالَتْ أَحَدُهُمَا يَأْتِ اسْتَأْجَرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتُ الْقَوِيَّ الْأَمِيَّ

Artinya : “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."

Bila karakter amanah dipelihara, maka kejujuran (shidq) dapat ditegakkan. Dalam hal ini shidq berkaitan dengan proses informasi anggaran, sedangkan amanah berkaitan dengan komitmen untuk mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran kepada yang berhak dalam rangka implementasi nilai-nilai kemanfaatan, kesejahteraan dan pertanggungjawaban.

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Penyerapan Anggaran

Berikut ini merupakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penyerapan anggaran antara lain sebagai berikut :

1) Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

DIPA merupakan hasil transformasi dari dokumen perencanaan anggaran atau RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran – Kementerian/Lembaga) yang dibuat oleh Kementerian Negara/Lembaga. Oleh karena itu, kualitas DIPA berkaitan erat dengan perencanaan anggaran. Semakin baik perencanaan anggaran yang dibuat oleh satker Kementerian Negara/Lembaga maka semakin baik pula kualitas DIPA tersebut.¹⁴ Kualitas DIPA antara lain ditunjukkan dengan ketepatan waktu dalam menerima DIPA, tidak adanya kesalahan dalam DIPA, tidak diperlukannya revisi DIPA, tidak adanya tanda bintang, dan lain-lain. Berdasarkan hasil survey penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan menunjukkan bahwa aspek dokumen pelaksanaan anggaran merupakan salah satu faktor penyebab

¹⁴ Redaksi Media Keuangan, *Realisasi Penyerapan Anggaran Capai 56,51 Persen* (Media Keuangan, 2011). h. 77

rendahnya penyerapan anggaran. Hal ini juga didukung oleh pendapat dari Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi laju penyerapan anggaran adalah dokumen DIPA yang masih memerlukan revisi. Ketidaktepatan dalam perencanaan atau penyusunan anggaran mengakibatkan perlunya tindakan revisi terhadap DIPA. Revisi DIPA ini akan mempengaruhi penyerapan anggaran karena jadwal kegiatan harus diubah sehingga waktu pelaksanaan menjadi mundur dan akhirnya terjadi sisa anggaran yang tidak sempat lagi digunakan pada akhir tahun. Selain itu, jika dilakukan revisi maka kegiatan dan program belum dapat dilaksanakan sampai dengan persetujuan atas revisi turun.¹⁵

2) Akurasi Perencanaan Kas

Perencanaan kas menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 03/PB/2010 adalah sebagai berikut : “Perkiraan penarikan dana adalah daftar perkiraan kebutuhan dana untuk melaksanakan kegiatan yang dibuat oleh kantor/satuan kerja dan disampaikan ke KPPN untuk periode tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN”¹⁶

3) Dokumen Perencanaan

Dasar hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

- a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Vina Eriyandi, “Implementasi Perencanaan Kas Sebagai Upaya Untuk Menciptakan Realisasi Anggaran Yang Proporsional Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda Tahun Anggaran 2011,” *Ekonomia* 1, no. 1 (2013): 162–166.

- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - c) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - d) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo UU 12 Tahun 2008.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.
 - f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 4) Pencatatan Administrasi

Administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratic* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan, dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi kembali jika dibutuhkan.¹⁷

5) Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengaruh yang ditimbulkan oleh pengelolaan anggaran dan SDM yang salah sangat banyak seperti contohnya pada aspek ekonomi, dimana karena adanya kesalahan pengelolaan anggaran dan penetapan SDM yang salah maka kualitas dari pelayanan akan menurun. Dalam hal ini proses perekonomian Indonesia akan lambat karena ketidakmampuan SDM dalam mengelola dengan baik. Di era globalisasi ini tentunya

¹⁷ Handayaniingrat, *Pengantar Studi Dan Administrasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988). h. 15

Pemerintah Indonesia sangat membutuhkan SDM yang mampu mengelola anggaran dengan baik.¹⁸

6) Dokumen Pengadaan

Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jenis dokumen pengadaan terdiri dari dokumen pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dan dokumen pengadaan jasa konsultasi. Dokumen pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya terdiri dari dokumen pemilihan penyedia dan dokumen pasca/prakualifikasi. Sedangkan dokumen pengadaan jasa konsultasi terdiri dari dokumen pemilihan penyedia dan dokumen prakualifikasi.

7) Uang Persediaan

Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (*revolving*) yang diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. UP hanya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perkantoran yang tidak mungkin dilaksanakan dengan pembayaran secara langsung atau dapat diartikan kegiatan yang sifatnya insidental/mendesak. Hal ini wajib dipahami oleh pengelola keuangan baik KPA, PPK, PPTK, PP SM, dan Bendahara Pengeluaran. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.¹⁹

Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GUP adalah permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang dianjurkan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan

¹⁸ *Ibid*, h. 16

¹⁹ *Ibid*

yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Penggunaan atas UP ini nantinya akan dibayar ke kas daerah melalui Ganti Uang Persediaan (GUP).

c. Optimalisasi Penyerapan Anggaran

Masalah penyerapan anggaran yang lambat selalu terulang setiap tahun. Padahal, pengeluaran atau belanja pemerintah menjadi faktor penting untuk menstimulasi perekonomian. Penyerapan anggaran berbasis kinerja sudah seharusnya berpegang pada tiga prinsip, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Prinsip ekonomis berarti memperhatikan kepatutan penggunaan input, sedangkan prinsip efisien membandingkan input atas output, dan prinsip efektif, yaitu membandingkan outcome atas output. Selama ini sistem penyerapan anggaran banyak terkendala oleh perilaku negatif birokrat yang suka menyimpan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di bank lalu memanfaatkan bunganya. Buruknya penyerapan anggaran juga disertai dengan overhead cost yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Selama ini sumber daya daerah yang sangat terbatas tersedot untuk biaya rutin eksekutif dan legislatif. Akibatnya, tinggal sedikit resources yang tersisa untuk kegiatan pelayanan publik atau untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).²⁰

Hal ini diperparah lagi oleh manajemen resources pemerintah daerah (pemda), berupa penggunaan input dan pengelolaannya untuk menghasilkan output dan outcome masih belum mengedepankan inovasi dan kreativitas. Karena itu diperlukan transformasi menuju pemerintahan yang efektif dengan menggunakan perkembangan konvergensi teknologi informasi. Dengan demikian, tekad Kementerian Dalam Negeri untuk merasionalisasi birokrasi sebaiknya tertuju kepada sasaran utama, yakni pemangkasan terhadap overhead cost pemda. Dengan cara ini, pos anggaran bisa lebih hemat dan tepat guna. Salah satu sistem yang bisa membantu mengoptimalkan penyerapan anggaran adalah dengan menerapkan

²⁰ Totok Siswantara, "Optimalisasi Penyerapan Anggaran," accessed September 20, 2020, <https://investor.id/archive/optimalisasi-penyerapan-anggaran>.

teknologi e-sourcing. Teknologi tersebut bisa diintegrasikan dengan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau e-procurement. Penting untuk digarisbawahi bahwa teknologi e-sourcing bukan sekadar katalog elektronik untuk keperluan pengadaan barang dan jasa melainkan juga bisa menjadi alat bantu analisis dan dijadikan rujukan standar teknis barang atau jasa publik bagi para user. E-sourcing juga bisa berfungsi sebagai source harga pasar untuk owner estimate. Dengan demikian ada acuan utama dalam menilai kewajaran harga. Teknologi e-sourcing dikembangkan berdasarkan prinsip supply chain management (SCM). Sistem penyerapan anggaran juga membutuhkan reformasi birokrasi. Sayangnya, reformasi birokrasi yang dilakukan selama ini tidak fokus pada kinerja dan efektivitas. Reformasi birokrasi baru sebatas menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) setiap tahun. Akibatnya, reinvention atau gerakan pembaruan administrasi belum terwujud dan daya saing pemda tetap terpuruk.

d. Prinsip Penyusunan APBD

Dalam penyusunan APBD, Pemerintah daerah bersama DPRD harus memperhatikan beberapa prinsip penyusunan APBD, yaitu :²¹

1) Partisipasi Masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.

2) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus

²¹ Haryanto, *Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Pendekatan Kinerja* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008). h. 78

bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

3) Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain :

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
- c) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.²²

4) Keadilan Anggaran

Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Masyarakat yang memiliki kemampuan pendapatan rendah secara proporsional diberi beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan kedua kebijakan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan perbedaan tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan. Selain daripada itu dalam mengalokasikan belanja daerah, harus mempertimbangkan

²² *Ibid*, h. 79

keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.²³

5) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan efektivitas perencanaan anggaran perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Tujuan, indikator, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
- b) Menentukan kegiatan prioritas dan menghitung beban kerja, serta menentukan harga satuan yang wajar.

e. Struktur APBD dan Kode Rekening

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Berikut ini merupakan tabel dari struktur APBD.²⁴

Tabel 2.1
Struktur APBD

Nomor Urut	Uraian
1.	PENDAPATAN DAERAH --→ Pos
1.1	Pendapatan Asli Daerah --→ Kelompok
1.1.1	Pajak Daerah --→ Jenis
1.1.2	Retribusi Daerah
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

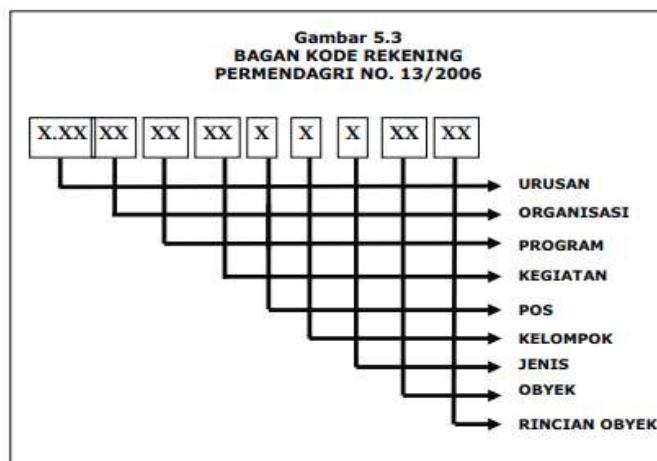
²³ Ramlah Basri, "Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1, no. 4 (2013). h. 205

²⁴ *Ibid*, h. 100

1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
1.2	Dana Perimbangan
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.2	Dana Alokasi Umum
1.2.3	Dana Alokasi Khusus
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
1.3.1	Hibah
1.3.2	Dana Darurat
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya
2.	BELANJA --→ Pos
2.1	Belanja Tidak Langsung --→ Kelompok
2.1.1	Belanja Pegawai --→ Jenis
2.1.2	Belanja Bunga
2.1.3	Belanja Subsidi
2.1.4	Belanja Hibah
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial
2.1.6	Belanja Bagi Hasil ke Provinsi/Kabupaten/Kota dan Desa
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan ke Provinsi/Kabupaten/Kota dan Desa
2.1.8	Belanja Tidak Terduga
2.2	Belanja Langsung
2.2.1	Belanja Pegawai
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa
2.2.3	Belanja Modal
	SURPLUS/(DEFISIT)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH
3.1	Penerimaan Pembiayaan

3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah
3.2	Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA) ²⁵

Dan berikut ini adalah gambar bagan kode rekening.



Gambar 2.1
Gambar Kode Rekening

²⁵ *Ibid*, h. 101

f. Arti Penting dan Unsur Kualitas Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran sangat penting karena akan menggerakkan perekonomian sektor riil, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. APBN adalah salah satu sumber penggerak ekonomi yang langsung mengarah kepada sektor riil. Untuk itu, penyerapannya yang tinggi akan berperan dalam mendorong bergeraknya sektor riil dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Perlu peran-serta semua pihak agar perekonomian tetap dalam kondisi yang baik ketika imbas krisis ekonomi global sudah masuk ke Indonesia. Jika pola penyerapan anggaran pemerintah terbiasa menumpuk di akhir tahun tentu tidak produktif bagi perekonomian. Sebab, mustahil bisa memaksimalkan penggunaan anggaran dalam tempo mepet. Padahal belanja pemerintah mestinya bisa menjadi lokomotif pendorong pertumbuhan ekonomi.²⁶ Dan unsur-unsur yang terdapat dalam kualitas penyerapan anggaran adalah sebagai berikut :

- 1) Rencana kegiatan suatu daerah.
- 2) Adanya sumber penerimaan untuk menutupi pengeluaran pemerintah daerah.
- 3) Jenis kegiatan dan proyek dalam bentuk angka.
- 4) Adanya periode anggaran biasanya 1 tahun Sedangkan definisi APBD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, juga ditetapkan dengan peraturan daerah.

g. Anggaran Menurut Perspektif Islam

Era kepemimpinan Rasulullah pasca beliau diangkat jadi Rasul otomatis memegang tampuk kekuasaan yang sangat besar. Beliau selain sebagai pemimpin agama, juga selaku pemimpin negara. Kedua bidang

²⁶ Tri Adi, "Penyerapan Anggaran," accessed September 20, 2020, <https://analisis.kontan.co.id/news/penyerapan-anggaran>.

garapan tersebut secara lengkap setelah beliau berhijrah ke kota Madinah. Apa yang telah dilakukan beliau adalah untuk menjalankan misi ketahuidan dengan jalan mensejahterakan umat, sejahtera di dunia dan sejahtera di akhirat. Di sektor politik, beliau telah merancang sebuah bentuk dakwah yang secara simultan sangat dapat mempengaruhi kesuksesan penyebaran Islam. Di antaranya dengan mengirim utusan-utusan diplomatik ke negara-negara tetangga. Pada sektor ekonomi, sebagaimana telah disebutkan di atas, adalah mengurus hal-hal penting di mana keterlibatan pemerintah cukup urgen supaya program tersebut dapat berjalan dengan baik. Termasuk di antara fungsi negara adalah mencetak mata uang yang beredar resmi dalam negara. Dalam sejarah, tercatat bahwa yang pertama mencetak nilai mata uang yang resmi bersumber dari pemerintah Islam adalah pada era Khalifah ‘Alī ibn Abī Thālib. Karena sebelum itu, yang digunakan adalah mata uang yang berasal dari negara lain. Dinar emas berasal dari kerajaan Byzantium dan Dirham perak dan kerajaan Sassanian.²⁷

Dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan.²⁸ Pertama, melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seperti halnya perusahaan lain, dari perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Kedua, pajak. Penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam pelbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lainlain. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan.

²⁷ Lili Yulyadi, "BOOK REVIEW: VIABILITY OF THE ISLAMIC GOLD DINAR," *Isefid Review* 1, no. 1 (2002): 88–96.

²⁸ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Cet. 2. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). h. 255-257

Sumber-sumber pendapatan negara di zaman Rasulullah Saw. tidak hanya terbatas pada zakat semata, namun ada beberapa pos lain yang tidak kalah pentingnya dalam menyokong keuangan negara. Zakat sendiri baru disyariatkan pada tahun kedelapan Hijriyah. Pertama, zakat. Pada masa awal-awal Islam, penerimaan pendapatan negara yang bersumber dari zakat berupa uang tunai, hasil pertanian dan hasil peternakan. Zakat merupakan unsur penting karena sistemnya penunaianya yang bersifat wajib (obligatory zakat system), sedangkan tugas negara adalah sebagai ‘âmil dalam mekanismenya. Zakat merupakan kewajiban bagi golongan kaya untuk memberikan perimbangan harta di antara sesama masyarakat. Dalam negara yang memiliki sistem pemerintahan Islam, maka negara berkewajiban untuk mengawasi pemberlakuan zakat. Negara memiliki hak untuk memaksa bagi mereka yang enggan berzakat jika mereka berada pada taraf wajib untuk mengeluarkan zakat. Apalagi jika mempertimbangkan keadaan masyarakat yang secara umum lemah perekonomiannya.²⁹

Dalam pengelolaan anggaran, ketelitian pencatatan sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporannya. Dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 282 juga telah dijelaskan tentang pencatatan dan ketentuan-ketentuan mengenai pencatatan, dan saksi dalam pencatatan sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا
أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

²⁹ Ali Abd al-Rasul, *Mabadi Al-Iqtishadi Fi Al-Islam*, Cet. 2. (al-Qahirah: Dar Fikr al-Arabi, 1980). h. 323

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
 الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
 وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ
 وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ

تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Asbabun Nuzul : Pada waktu rasulullah saw datang kemadinah pertama kali orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua, atau tiga tahun.” (Q.S. al-Baqarah: 282).³⁰

Ayat diatas berisikan tentang anjuran pentingnya pencatatan setiap transaksi yang sudah terjadi dalam perekonomian khususnya juga dalam bidang anggaran, agar tidak terjadi kesalahan dalam menyampaikan laporan anggaran dan juga agar mengetahui berapa persen penyerapan anggaran tersebut jika dilakukannya sebuah pencatatan. Dalam pos pengeluaran negara, tentu saja sangat dipengaruhi oleh fungsi negara Islam itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, dakwah Islam, dan lain-lain. Ada hal-hal tertentu yang perlu dipahami di negara Islam terkait dengan pemasukan dan pengeluaran anggaran. Khususnya pada pengeluaran, ada kekhususan atau karakteristik tersendiri terkait dengan pengeluaran. Karakteristik tersebut sangat menonjol pada perhatian yang besar pada belanja atau pengeluaran bagi masyarakat yang tidak mampu. Alokasi dengan dasar ketidakmampuan menjadi barometer yang cukup membedakannya dengan sistem belanja pada ekonomi konvensional. Di konvensional, terlihat jelas ketergantungan perekonomian terhadap mekanisme pasar begitu dominan. Bahkan sudah menjadi suatu ideologi bahwa penyerahan perekonomian pada pasar akan berakhir pada kesejahteraan rakyat. Bagian pengeluaran yang paling penting

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Bil Hadis* (Bandung: Cordoba, 2019). h. 48

dari pendapatan keseluruhan adalah dana pensiun kemudian diikuti oleh dana pertahanan negara dan dana pembangunan. Secara garis besar pengeluaran negara pada masa kekhalifahan Umar dikeluarkan untuk kebutuhan yang mendapat prioritas pertama, yaitu pengeluaran dana pensiun bagi mereka yang bergabung dalam kemiliteran, baik Muslim maupun non-Muslim. Dana tersebut juga termasuk pensiunan bagi pegawai sipil.³¹

Keuangan negara mengurus pengeluaran dan pendapatan pemerintah, dan hal-hal yang berhubungan dengan negara, begitu pula administrasi dan pengawasan keuangan.³² Keuangan negara dalam pemerintahan Islam bertujuan untuk menyejahterakan warga negaranya yang sumbernya diperoleh dari sumber-sumber pendapatan yang sifatnya permanen dan sumber pendapatan yang bersifat temporer.³³ Karakteristik dalam sistem Islam, paling tidak dapat dibagi dua. Yaitu, karakteristik pengeluaran terikat dan pengeluaran yang tidak terikat. Pengeluaran yang terikat adalah di mana distribusi pengeluaran dari penerimaan dialokasikan hanya kepada objek tertentu. Misalnya: zakat, *khumus*, dan wakaf. Pada pos zakat, akumulasi dana yang terhimpun tidak dibenarkan oleh syariat untuk dipergunakan selain kepada delapan golongan mausia yang berhak atas zakat, atau yang dikenal dengan *mustahiq*. Sementara, pengeluaran tidak terikat, sesuai kondisi dan kebutuhan *an sich*. Berikut ini merupakan tabel anggaran penerimaan dan belanja negara islam.

³¹ Muhammad Yafiz, Muhammad Arif, and Aqwa Naser Daulay, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Medan: Febi Press UINSU, 2016). h. 107

³² Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997). h. 247

³³ Isnaini Harahap et al., *Hadis-Hadis Ekonomi* (Prenada Media, 2017). h. 230

Tabel 2.2
Penerimaan dan Belanja Negara Islam.

Penerimaan	Pengeluaran
Jenis Regulasi	
Zakat	Kebutuhan dasar
<i>Kharaj</i>	Kesejahteraan sosial
<i>Jizyah</i>	Pendidikan dan penelitian
<i>'usyur</i>	Infrastruktur (fasilitas publik)
Jenis Sukarela	Dakwah Islam
Infaq - sedekah	Administrasi negara
Wakaf	Pertanahan dan keamanan
Hadiah - hibah	
Jenis Kondisional	
<i>Khumus</i>	
Pajak (<i>Nawaib</i>)	
Keuntungan BUMN	
Dan lain-lain ³⁴	

2. Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

a. Pengertian DIPA

DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri

³⁴ Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet 2, 2007,), h. 258

Keuangan.³⁵ Setiap departemen/lembaga harus menyusun anggaran untuk rencana kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Rencana kegiatan tersebut berupa RKA-KL. RKA-KL merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga yang merupakan penjabaran dari RKP dan rencana strategis Kementerian/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta pagu anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa RKA-KL merupakan suatu rencana kerja yang disusun oleh setiap departemen/lembaga mengenai kegiatan di masa yang akan datang (dalam jangka waktu 1 tahun) yang sifatnya komprehensif. Setiap departemen wajib mengajukan anggaran rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-KL) ke kementerian keuangan untuk meminta persetujuan atau otorisasi.³⁶ DIPA atau DPA berlaku untuk satu Tahun Anggaran dan informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Disamping itu DIPA atau DPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan peraturan pemerintah.³⁷

DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Selain itu, DIPA berfungsi sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas

³⁵ Wikipedia, "Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran," accessed September 21, 2020, https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Isian_Pelaksanaan_Anggaran.

³⁶ Bahtiar and Arif, *Akuntansi Pemerintahan* (Jakarta: Salemba Empat, 2001). h. 23

³⁷ Irma Aldina, "Pengaruh Kualitas Dipa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris Pada Skpd Di Kota Padang)." *Jurnal Akuntansi* 4.1, h. 5

pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan kepada kaidah ushul fiqh di atas, dapat ditegaskan bahwa pengawasan anggaran adalah suatu kewajiban karena, penerapan shidq dan amanah tidak ber-jalan, tanpa adanya pengawasan. Pengawasan tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa transparansi anggaran. Oleh karena itu dalam perspektif fiqh anggaran, menegakkan transparansi Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 150 yang berbunyi :

بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ

Artinya : “Tetapi hanya Allah lah pelindungmu, dan dia penolong terbaik”

Bahwa anggaran adalah pelaksanaan ibadah yang menempati kedudukan yang mulia dalam agama.

b. Jenis-jenis DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

DIPA disusun untuk masing-masing satker dan pada prinsipnya satu DIPA untuk satu satker. Dalam hal tertentu, satu DIPA dapat meliputi beberapa satker pada masing-masing provinsi. Dalam rangka efisiensi pelaksanaan anggaran, Kementerian Negara/Lembaga dapat menyusun DIPA untuk beberapa satker dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Berdasarkan pembagian anggaran dalam APBN, jenis DIPA dapat dikelompokkan atas DIPA Kementerian Negara/Lembaga dan DIPA Bendahara Umum Negara (DIPA BUN).

1) DIPA Kementerian/Lembaga

DIPA Kementerian Negara/Lembaga adalah DIPA satker yang memuat rincian penggunaan anggaran dari Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang dapat dikategorikan menjadi :

a) DIPA Satker Pusat/Kantor Pusat (KP)

DIPA satker Pusat/Kantor Pusat (KP) adalah DIPA yang dikelola oleh satker Kantor Pusat dan atau satker pusat suatu Kementerian Negara/ Lembaga, termasuk di dalamnya DIPA satker Badan Layanan Umum (BLU), dan DIPA Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT). Satker pusat dapat terdiri dari satker-satker yang dibentuk oleh Kementerian Negara/Lembaga secara fungsional dan bukan merupakan instansi vertikal. Sedangkan satker Kantor Pusat adalah satker dalam lingkup Kantor Pusat suatu Kementerian Negara/Lembaga. DIPA satker Kantor Pusat/satker pusat disusun dan ditetapkan oleh PA/KPA masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.³⁸

b) DIPA Satker Vertikal/Kantor Daerah (KD)

DIPA satker Vertikal/Kantor Daerah (KD) adalah DIPA yang dikelola oleh Kantor/Instansi Vertikal Kementerian Negara/Lembaga di daerah termasuk di dalamnya untuk DIPA satker BLU. DIPA satker Vertikal/Kantor Daerah disusun dan ditetapkan oleh KPA satker Vertikal/Kantor Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

c) DIPA Dana Dekonsentrasi (DK)

DIPA Dana Dekonsentrasi (DK) adalah DIPA dalam rangka pelaksanaan dana dekonsentrasi, yang dikelola oleh SKPD Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur. DIPA Dana Dekonsentrasi disusun dan ditetapkan oleh KPA SKPD yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pendelegasian wewenang dari Menteri/Pimpinan Lembaga.

d) DIPA Tugas Pembantuan (TP)

³⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011, *Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran*, n.d.

DIPA Tugas Pembantuan (TP) adalah DIPA dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan, yang dikelola oleh SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang memberi tugas pembantuan. DIPA Tugas Pembantuan disusun dan ditetapkan oleh KPA SKPD yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

e) DIPA Urusan Bersama (UB)

DIPA Urusan Bersama (UB) adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka pelaksanaan Urusan Bersama, yang pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD Provinsi/Kabupaten/ Kota yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga berdasarkan usulan Kepala Daerah. DIPA Urusan Bersama disusun dan ditetapkan oleh Kepala SKPD yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.³⁹

2) DIPA Bendahara Umum Negara (DIPA-BUN)

DIPA Bendahara Umum Negara (DIPA-BUN) adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran yang bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) yang dikelola Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran. BA-BUN (999) terdiri atas :

- a) Pengelolaan Utang Pemerintah (999.01)
- b) Pengelolaan Hibah (999.02)
- c) Pengelolaan Investasi Pemerintah (999.03)
- d) Pengelolaan Penerusan Pinjaman (999.04)
- e) Pengelolaan Transfer ke Daerah (999.05)
- f) Pengelolaan Belanja Subsidi (999.07)
- g) Pengelolaan Belanja Lain-lain (999.08)
- h) Pengelolaan Transaksi Khusus (999.99)

³⁹ *Ibid*

DIPA BUN disusun dan ditetapkan oleh Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku PA. PPA merupakan Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Suatu PPA dalam rangka pengelolaan anggaran dapat mengusulkan satker baru sebagai KPA untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN apabila terdapat penugasan secara khusus dari PPA. PPA dapat mengusulkan adanya satker baru dalam rangka pengelolaan RDP-BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Anggaran III. Selanjutnya Direktorat Jenderal Anggaran memberitahukan persetujuan/penolakan atas usulan dimaksud kepada PPA yang bersangkutan.⁴⁰

c. Pokok-pokok Materi DIPA

Pokok-pokok materi DIPA terdiri dari organisasi, fungsi, pejabat perbendaharaan, rincian penggunaan anggaran, rencana penarikan dana, dan perkiraan penerimaan.

1) Organisasi

Alokasi anggaran pada DIPA disusun untuk masing-masing Kementerian Negara/Lembaga sesuai struktur organisasinya. Rincian anggaran disusun mulai dari Bagian Anggaran (Kementerian Negara/Lembaga), Unit Organisasi (Unit Eselon I) dan satker. Penyusunan DIPA menurut organisasi dilakukan untuk melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian hasil (outcome) dari program Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan visi dan misi organisasinya.⁴¹ Pengertian bagian anggaran, unit organisasi dan satker adalah sebagai berikut :

a) Bagian Anggaran

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

Bagian Anggaran adalah Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai bagian tertentu dari penggunaan anggaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Kementerian Negara/Lembaga dalam hal ini bertindak sebagai PA.

b) Unit Organisasi

Unit Organisasi adalah unit eselon I Kementerian Negara/Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tugas pokok, fungsi, dan hasil (*outcome*) dari program tertentu dalam Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

c) Satker

Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN. Satker dalam hal ini merupakan unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah yang memperoleh kuasa penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, program, dan misi Pengguna Anggaran. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi, program, dan misi tersebut, satker juga merupakan kesatuan entitas manajemen dan keuangan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

2) Fungsi

Fungsi merupakan uraian kualitatif dari alokasi dana untuk menjelaskan program/kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran/hasil/keluaran sebagai akibat pelaksanaan program/kegiatan tersebut. Uraian kualitatif fungsi dalam DIPA bermanfaat untuk mengkaitkan DIPA dengan pencapaian kinerja satker sesuai dengan penugasan dan penguasaan anggaran dari Pengguna Anggaran. Dalam rangka memenuhi pencantuman materi fungsi, maka dalam DIPA harus memuat uraian fungsi dan subfungsi, program, hasil (*outcome*), indikator

kinerja utama program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan keluaran (*output*). Pengertian fungsi dan subfungsi, program, hasil (*outcome*), indikator kinerja utama program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan keluaran (*output*) adalah sebagai berikut :

a) Fungsi

Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

b) Subfungsi

Subfungsi adalah penjabaran lebih lanjut dari fungsi yang terinci ke dalam beberapa kategori.

c) Program

Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.⁴²

d) Hasil (*Outcome*)

Hasil (*Outcome*) adalah kinerja atau tujuan yang akan dicapai dari suatu pengerahan sumber daya dan anggaran pada suatu program dan kegiatan. Hasil (*outcome*) dirumuskan secara kuantitatif, jelas dan terukur. Hasil (*outcome*) pada DIPA harus dapat mencerminkan sasaran kinerja sesuai Visi dan Misi serta Tugas Pokok dan Fungsi Unit Eselon I. Disamping itu hasil (*outcome*) harus mendukung secara langsung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Negara/Lembaga. Setiap hasil (*outcome*) hanya dapat mendukung pencapaian sebuah Sasaran Strategis Unit Eselon I terkait.⁴³

e) Indikator Kinerja Utama Program

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

Indikator Kinerja Utama (IKU) Program merupakan indikator unggulan yang mencerminkan kinerja Program. Penetapan IKU Program dapat dilakukan dengan memilih indikator kinerja kegiatan yang dianggap sebagai unggulan atau merupakan composite index dari beberapa kegiatan. IKU Program juga mencerminkan hubungan langsung dengan *outcome* yang akan dicapai. Penetapan rumusan IKU Program tetap mengacu pada fokus dan karakteristik masing-masing unit eselon I.

f) Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satker sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.

g) Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) mencerminkan tolok ukur sebagai dasar penilaian kinerja Kegiatan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan kuantitas (*volume output*), kualitas dan harga output. Untuk Kegiatan yang menghasilkan beberapa jenis *output*, rumusan indikator juga menggambarkan produk yang dihasilkan. Dalam hal rumusan dengan pendekatan kualitas, harus disiapkan data baseline sebagai pembandingan. Sebuah Kegiatan dapat memiliki beberapa indikator kinerja.

h) Keluaran (*Output*)

Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan atas pelaksanaan dari 1 (satu) atau beberapa paket pekerjaan yang tergabung dalam kegiatan. Keluaran (*output*) merupakan sasaran suatu kegiatan. Kegiatan dapat terdiri dari satu atau lebih keluaran

(*output*) karena kegiatan tersebut mempunyai satu atau lebih jenis dan satuan keluaran yang berbeda satu sama lain. Keluaran (*output*) yang satu dengan keluaran (*output*) yang lain dapat dibedakan berdasarkan perbedaan keluaran, sehingga besaran keluaran kegiatan tidak selalu merupakan penjumlahan dari besaran-besaran keluaran (*output*) dalam satu kegiatan.⁴⁴

3) Pejabat Perbendaharaan

Pejabat Perbendaharaan adalah para pengelola keuangan pada satker yang diberi tugas sebagai kuasa pengguna anggaran, penguji dan penerbit Surat Perintah Membayar (SPM), dan pelaksana tugas kebendaharaan. Pejabat Perbendaharaan tersebut terdiri dari KPA, PP SPM dan Bendahara Pengeluaran.

a) KPA

KPA adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PA untuk melaksanakan program/kegiatan dan diberikan kewenangan untuk menggunakan anggaran dalam DIPA. KPA menjadi manajer, melakukan pengelolaan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA. Pejabat yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai KPA adalah Kepala satker atau pejabat lain yang ditunjuk dalam lingkup satker tersebut.

b) PP-SPM

PP SPM adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran tagihan kepada negara, dan selanjutnya menerbitkan SPM atas beban DIPA berkenaan.

c) Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PA/KPA untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang

⁴⁴ *Ibid*

untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satker Kementerian Negara/ Lembaga.⁴⁵

4) Rincian Penggunaan Anggaran

Rincian penggunaan anggaran adalah rincian anggaran yang dibelanjakan dalam rangka :

- a) Pelaksanaan rencana kerja satker untuk mencapai hasil (*outcome*) yang ditetapkan.

Untuk mencapai hasil (*outcome*) yang ditetapkan, DIPA disusun berdasarkan fungsi dan subfungsi, program, indikator kinerja utama program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan, keluaran (*output*). Masing-masing rincian anggaran dalam fungsi, subfungsi, program, indikator kinerja utama program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan, keluaran (*output*), dicantumkan per jenis belanja. Jenis belanja yang ditampilkan pada DIPA adalah 2 (dua) digit pertama dari rincian akun pada Bagan Akun Standar. Penetapan jenis belanja sebagai rincian anggaran dalam DIPA dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas kepada KPA untuk melakukan penyesuaian atas akun belanja pada 4 (empat) digit terakhir dari Bagan Akun Standar. Hal ini sesuai prinsip *let's managers manage* dan Penganggaran Berbasis Kinerja.

- b) Anggaran yang disediakan dapat dibayarkan/dicairkan melalui mekanisme APBN.

Rincian penggunaan anggaran dalam DIPA berfungsi sebagai dasar pembayaran dan pembebanan pada anggaran negara. Oleh karena itu, rincian penggunaan anggaran harus memenuhi ketentuan pembayaran dalam mekanisme pelaksanaan APBN sehingga dana yang dialokasikan dapat dicairkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara. Ketentuan pelaksanaan pembayaran meliputi kesesuaian pencantuman rincian penggunaan dana dengan standar akuntansi

⁴⁵ *Ibid*

pemerintah dan persyaratan pencairan dana, seperti kode kantor bayar, sumber dana, dan kesesuaian jenis belanja.⁴⁶

c) Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan.

Pencantuman rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan dalam DIPA diperlukan untuk pencapaian optimalisasi fungsi DIPA sebagai alat manajemen kas pemerintah. Disamping sebagai alat manajemen kas pemerintah, juga sebagai alat monitoring/pembanding terhadap penyerapan pagu. Rencana Penarikan Dana merupakan pelaksanaan fungsi manajemen kas pemerintah dari sisi belanja negara. Pengesahan DIPA oleh Bendahara Umum Negara memberi jaminan bahwa anggaran dalam DIPA dapat disediakan oleh negara dalam jumlah yang cukup pada saat anggaran tersebut ditagihkan. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan kas negara, ketepatan waktu penyediaan uang untuk memenuhi tagihan negara menjadi penting. Perkiraan penerimaan baik penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperlukan untuk menghitung proyeksi penerimaan negara melalui kas negara.

3. Akurasi Perencanaan Kas

a. Pengertian Perencanaan Kas

Perencanaan kas merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan best practices pengelolaan/manajemen kas untuk mengidentifikasi kebutuhan kas dimasa-masa yang akan datang, sehingga kepastian untuk penyediaan kas sesuai kebutuhan dan penggunaan/optimalisasi kas dapat terwujud.⁴⁷ Sesuai dengan PMK nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas, satker wajib menyampaikan RPD Harian atas

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Online Monitoring SPAN, "Modul Perencanaan Kas/Renkas," accessed September 22, 2020, <https://hai.kemenkeu.go.id/kb/articles/pdf/penjelasan-menu-modul-perencanaan-kas-renkas>.

rencana pengajuan setiap SPM yang nilainya masuk dalam kriteria transaksi besar.

Penerapan prosedur perencanaan kas dalam rangkaian prosedur pelaksanaan anggaran dilakukan untuk melakukan perbaikan proses pengambilan keputusan pada otoritas kuasa Bendahara Umum Negara (BUN). Perencanaan kas merupakan suatu usaha untuk melakukan sebuah pengelolaan kas yang baik. Pengelolaan kas yang baik adalah memiliki uang dalam jumlah yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk memenuhi pembayaran kewajiban-kewajiban pemerintah dengan biaya yang efisien dan resiko yang terkendali. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan jawaban atas kebutuhan pengelolaan keuangan negara dalam mengelola sumber daya keuangan secara efisien. Dalam undang-undang tersebut telah diatur beberapa fungsi perbendaharaan negara. Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi, perencanaan kas yang baik, pencegahan agar tidak sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur (*idle cash*) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan. Selain itu, juga diatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi–fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta barang milik negara/ daerah yang selama ini belum mendapat perhatian yang memadai. Perencanaan kas sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan kas merupakan fungsi yang dilaksanakan oleh unit perbendaharaan, mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan tentang aliran kas daerah. Agar dapat mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah, pengelolaan kas selayaknya dilaksanakan secara terencana, transparan dan akuntabel.⁴⁸ Pemerintah daerah kemudian membentuk suatu unit kerja yang melaksanakan fungsi perbendaharaan

⁴⁸ Rudy Widodo, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akurasi Perencanaan Kas Keluar (Rencana Penarikan Dana Harian) Tingkat Satuan Kerja,” *Jurnal Sumber Daya Aparatur* 1, no. 1 (2019).

yang mencakup perencanaan, penerimaan, penatausahaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban kas daerah, yang disebut sebagai bendahara daerah atau Bendahara Umum Daerah (BUD).

Perencanaan keuangan/kas yang baik akan menghasilkan sebuah rencana keuangan yang jelas dan memudahkan kita untuk mencapai suatu tujuan finansial. Tujuan perencanaan keuangan adalah untuk menghemat apapun menjadikan pengeluaran menjadi lebih efektif, atau digunakan untuk hal-hal yang prioritas. Artinya kita bisa mengelola besarnya uang yang masuk dan mengelolanya dengan baik. Tujuan perencanaan keuangan dalam perspektif Islam adalah perencanaan menjadikan fallah sebagai tujuan finansial yang berarti mendapat keberuntungan, kemuliaan, dan ketenangan tidak hanya didunia namun juga diakhirat.⁴⁹

Terdapat beberapa kerangka pengelolaan keuangan dalam Islam, yaitu yang pertama Goal pengelolaan keuangan Islam adalah fallah, yang kedua Goal perantara untuk mencapai fallah adalah masalah, yang ketiga pengelolaan keuangan didedikasikan untuk kehidupan di akhirat yang dimana sudah tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

⁴⁹ Dwi Suwiknyo, *Tarbiyah Finansial* (Yogyakarta: Diva Press, 2009). h. 12

Yang keempat Menghindari cara-cara yang maisir, ghoror, riba dan dzalim baik dalam mengumpulkan pendapatan maupun dalam membelanjakannya, dan yang kelima Utamakan shadaqoh meskipun rizki sedang sempit, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah At-Thalaq ayat 7 sebagai berikut :

لَيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

4. Pengaruh Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran

DIPA merupakan hasil transformasi dari dokumen anggaran atau RKA-KL yang dibuat oleh Kementerian Negara/Lembaga. Oleh karena itu, kualitas DIPA berkaitan erat dengan perencanaan anggaran. Semakin baik perencanaan anggaran yang dibuat oleh satker kementerian negara/lembaga maka semakin baik pula kualitas DIPA tersebut. Kualitas DIPA antara lain ditunjukkan dengan ketepatan waktu dalam menerima DIPA, tidak adanya kesalahan dalam DIPA, tidak diperlukannya revisi DIPA, tidak adanya tanda bintang, dan lain-lain.

Ketidaktepatan dalam perencanaan atau penyusunan anggaran mengakibatkan perlunya tindakan revisi terhadap DIPA. Revisi DIPA ini akan mempengaruhi penyerapan anggaran karena jadwal kegiatan harus diubah sehingga waktu pelaksanaan menjadi mundur dan akhirnya terjadi sisa

anggaran yang tidak sempat lagi digunakan pada akhir tahun.⁵⁰ Selain itu, jika dilakukan revisi maka kegiatan dan program belum dapat dilaksanakan sampai dengan persetujuan atas revisi turun.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suwito (2017) menunjukkan hasil bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas DIPA berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran satker-satker diwilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung.

5. Pengaruh Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran

Perencanaan kas merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan best practices pengelolaan/manajemen kas untuk mengidentifikasi kebutuhan kas dimasa-masa yang akan datang, sehingga kepastian untuk penyediaan kas sesuai kebutuhan dan penggunaan/optimalisasi kas dapat terwujud. Sesuai dengan PMK nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas, satker wajib menyampaikan RPD Harian atas rencana pengajuan setiap SPM yang nilainya masuk dalam kriteria transaksi. Perencanaan kas juga merupakan suatu bagian penting dalam upaya percepatan penyerapan anggaran karena dengan adanya perencanaan kas yang baik dan akurat akan memastikan tersedianya dana untuk membiayai kegiatan pemerintah. Hal ini tentunya dapat mencegah kemungkinan terhambatnya suatu kegiatan akibat dari tidak tersedianya dana. Hal ini sejalan dengan hasil *Workshop* Perencanaan Kas yang diadakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Direktorat Transformasi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Yogyakarta pada tanggal 11 Agustus 2011.

Workshop ini menyimpulkan bahwa semakin meningkatnya akurasi perencanaan kas maka semakin baik kualitas penyerapan anggaran.

⁵⁰ Ratih Seftianova and Helmy Adam, "Pengaruh Kualitas DIPA Dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Satker Wilayah KPPN Malang," JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi 4, no. 01 (2013): 4448.

Peningkatan akurasi perencanaan kas dapat berdampak pada penyerapan anggaran yang proporsional, tidak terjadi penumpukan pencairan dana di akhir tahun.⁵¹ Haryanto dan Wihascaryo (2011) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa tingkat akurasi penarikan dana yang rendah akan menyebabkan penumpukan pada anggaran yang tidak dicairkan tepat pada waktunya.⁵² Hal ini terjadi karena satker tidak mempunyai pedoman yang tepat mengenai kapan anggaran belanja seharusnya direalisasikan/dicairkan. Apabila tingkat akurasi penarikan dana yang rendah ini dibiarkan terjadi berlarut-larut maka akan mendorong terjadinya masalah penyerapan anggaran yang terkonsentrasi pada akhir tahun dimana satker berupaya mencairkan seluruh pagu dana yang tercantum dalam DIPA.⁵³

6. Analisis Akuntansi Syariah dan Anggaran

Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam, misalnya adanya kewajiban membayar zakat. Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam.

Akuntansi modern tidak mungkin bebas dari nilai dan kepentingan apapun, karena dalam proses penciptaan akuntansi melibatkan manusia yang memiliki kepribadian dan penuh dengan kepentingan. Nilai utama yang melekat dalam diri akuntansi modern adalah nilai egoistic dan materialistik. Bila informasi yang dihasilkan oleh akuntansi egoistik dikonsumsi oleh para

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

pengguna, maka dapat dipastikan bahwa pengguna tadi akan berpikir dan mengambil keputusan yang egoistik pula. Bagi kalangan masyarakat muslim, Tuhan menjadi tujuan akhir dan menjadi tujuan puncak kehidupan manusia.

Akuntansi syariah hadir untuk melakukan dekonstruksi terhadap akuntansi modern. Melalui epistemologi berpasangan, akuntansi syariah berusaha memberikan kontribusi bagi akuntansi sebagai instrumen bisnis sekaligus menunjang penemuan hakikat diri dan tujuan hidup manusia. Akuntansi syariah memformulasikan laporan keuangannya untuk memberikan informasi dan media untuk akuntabilitas. Informasi yang terdapat dalam akuntansi syariah merupakan informasi materi baik mengenai keuangan maupun non-keuangan, serta informasi non-materi seperti aktiva mental dan aktiva spiritual. Contoh aktiva spiritual adalah ketaqwaan, sementara aktiva mental adalah akhlak yang baik dari semua jajaran manajemen dan seluruh karyawan. Sebagai media untuk akuntabilitas, akuntansi syariah memiliki dua macam akuntabilitas yaitu akuntabilitas horisontal dan akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas horisontal berkaitan dengan akuntabilitas kepada manusia dan alam, sementara akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas kepada Sang Pencipta Alam Semesta.⁵⁴

Pada era sekarang ini, Lembaga atau sebuah organisasi baik bersifat profit (sektor swasta) maupun nonprofit (Pemerintah) adalah yang mampu melakukan efisiensi, peningkatan mutu, dan mampu mem-pertahankan kelangsungan hidup organisasi dan terus berkembang. Kondisi tersebut menuntut para pemangku kebijakan untuk meningkatkan kinerja yang tidak lepas dari kemampuan dalam perencanaan, peng-koordinasian, dan pengendalian berbagai aktivitas dan sumber daya yang dimiliki. Organisasi memerlukan anggaran sebagai salah satu komponen penting agar tetap survive dalam menjalankan suatu aktivitas untuk menerjemahkan seluruh strategi menjadi rencana dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang.⁵⁵ Anggaran

⁵⁴ Hendra Harmain et al., "Akuntansi Syariah Di Indonesia" (2019). h. 9-10

⁵⁵ Hansen Don R, *Akuntansi Manajemen* (Jakarta: Salemba Empat, 2006). h. 54

merupakan gambaran kuantitatif dari tujuan-tujuan manajemen dan menjadi alat untuk menentukan kemajuan dalam mencapai tujuan tersebut.

Melalui anggaran, organisasi mengkomunikasikan rencana-rencana manajemen ke semua anggota organisasi, mengkoordinasikan aktivitas dari berbagai bagian organisasi, menugaskan tanggungjawab kepada manajer, juga memperoleh komitmen dari manajer yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja dari manajer. Fungsi anggaran yang lain adalah merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis sehingga dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam organisasi untuk menjalankan kegiatannya, karena penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan prediksi pada masa yang akan datang.

Umat Islam Indonesia semakin memperhatikan keputusan-keputusan atau ketetapan ulamanya sendiri dan mempunyai kecenderungan untuk mengurangi keterikatan pada *fiqh* madzab *fiqh* yang empat, terutama terhadap ketetapan-ketetapan yang bersifat kontemporer. Kondisi tersebut berimplikasi kepada tuntutan terhadap ulama dan cendekiawan muslim agar bersikap lebih responsif terhadap eskalasi persoalan kekinian di semua bidang, termasuk persoalan ekonomi seperti pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, respon ulama dan cendekiawan muslim Indonesia akan adanya *fiqh* anggaran, menjadi urgen untuk didiskusikan lebih lanjut, sebagai bentuk dinamika pemikiran hukum ekonomi Islam di Indonesia. Mengkaji tentang *fiqh* anggaran, tidak bisa lepas dari kajian *fiqh* itu sendiri. Secara etimologis, *fiqh* diambil dari kata *faqih*-*yafqahu fiqhan* yang berarti mengetahui dan memahami. Menurut Ibn Manzur *fiqh* berarti “mengetahui dan memahami sesuatu”. Sedangkan menurut terminologi ahli *usul al-fiqh (usuliyyun)*, *fiqh* berarti ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang diperoleh melalui *ijtihad*.

Dalam pengelolaan anggaran, kejujuran (*shidq*) tersebut adalah suatu kewajiban, yang tidak bisa dijalankan kecuali dengan penerapan prinsip transparansi anggaran. Oleh karena itu berdasarkan kaidah tersebut maka, melakukan transparansi anggaran adalah wajib. Perilaku jujur (*shidq*), sangat berkaitan dengan sifat *amanah*. Bila karakter *amanah* dipelihara, maka

kejujuran (*shidq*) dapat ditegaskan. Dalam hal ini *shidq* berkaitan dengan proses informasi anggaran, sedangkan *amanah* berkaitan dengan komitmen untuk mengalokasikan dan mendistribusikan ang-garan kepada yang berhak dalam rangka implementasi nilai-nilai kemanfaatan, kesejahteraan dan pertanggungjawaban.⁵⁶

Berdasarkan kepada kaidah *ushul fiqh* di atas, dapat ditegaskan bahwa pengawasan anggaran adalah suatu kewajiban karena, penerapan *shidq* dan *amanah* tidak berjalan, tanpa adanya pengawasan. Pengawasan tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa transparansi anggaran. Oleh karena itu dalam perspektif *fiqh* anggaran, menegakkan transparansi anggaran adalah pelaksanaan ibadah yang menempati kedudukan yang mulia dalam agama.

B. Penelitian Sebelumnya

Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.3
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Nama Variabel	Hasil Penelitian
1.	Ratih dan Helmy (2013)	Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada	X1 : Kualitas DIPA. X2:Akurasi Perencanaan Kas. Y:Kualitas Penyerapan Anggaran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas DIPA berpengaruh positif terhadap kualitas penyerapan anggaran, baik dari segi tingkat penyerapan anggaran maupun

⁵⁶ Abdul Kadir Arno, "Penyusunan Anggaran Perspektif Fiqih Anggaran Hukum Ekonomi Syariah," 2018. h. 38

		Satker Wilayah KPPN Malang.		proporsionalitas penyerapan anggaran antar periode. ⁵⁷
2.	Irma Aldina (2016)	Pengaruh Kualitas DIPA, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris Pada SKPD Kota Padang).	X1: Kualitas DIPA. X2:Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. X3:Sistem Anggaran Berbasis Kinerja. Y : Tingkat Penyerapan Anggaran.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas DIPA berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran. Sistem pengendalian internal pemerintah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat penyerapan anggaran. Sistem anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh signifikan tetapi berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan anggaran. ⁵⁸
3	Heru Suwito (2017)	Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada	X1 : Kualitas DIPA X2:Akurasi Perencanaan Kas. Y : Kualitas Penyerapan Anggaran.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran satker-satker di wilayah kerja Kanwil

⁵⁷ Ratih Seftianova dan Helmy Adam, "Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Satker Wilayah KPPN Malang", *Jurnal Akuntansi*, 2013, h. 83

⁵⁸ Irma Aldina, "Pengaruh Kualitas DIPA, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris Pada SKPD Kota Padang)", *Jurnal Akuntansi 4.1*, 2017, h. 18

		Satker-Satker Wilayah Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung.		Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung. ⁵⁹
4	Denita Lilik Mastuti, et.al (2017)	Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran, Lingkungan Birokrasi, Komitmen Manajemen, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran.	X1:Karakteristik Tujuan Anggaran X2:Lingkungan Birokrasi X3:Komitmen Manajemen X4:Kualitas Sumber Daya Manusia Y:Penyerapan Anggaran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karakteristik tujuan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran kelurahan di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, maka Kepala Kelurahan hendaknya memberikan penghargaan kepada pegawai struktural yang berprestasi sehingga pegawai dapat bekerja lebih baik dan termotivasi dalam proses penyusunan rencana anggaran hingga realisasi anggaran. Lingkungan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran kelurahan di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, maka Kepala Kelurahan perlu

⁵⁹ Heru Suwito, "Pengaruh Kualitas DIPA Dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Satker-Satker Di Wilayah Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung" (Universitas Lampung, 2017).

				<p>mengikutsertakan pegawai dalam perencanaan kegiatan perencanaan anggaran sehingga setiap arahan yang diberikan oleh atasan telah dilaksanakan dengan baik oleh bawahan. Komitmen manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran kelurahan di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, maka Kepala Kelurahan hendaknya memilih ataupun mengangkat pegawai yang tepat di bidangnya khususnya dalam penyerapan anggaran sehingga hasil kerja menjadi lebih baik. Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran kelurahan di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, maka Kepala Kelurahan hendaknya mengikutsertakan pegawai di dalam pelatihan penyusunan anggaran sehingga kualitas</p>
--	--	--	--	--

				pegawai dapat mengalami peningkatan. ⁶⁰
5	Wieske Anneleen Ratag, et.al	Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi	X1:Perencanaan Anggaran Y:Penyerapan Anggaran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap penyerapan anggaran DIPA. Begitu juga dengan belanja barang yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran DIPA. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran DIPA. ⁶¹
6	Darwis Lannai dan Asbi Amin (2020)	<i>Factors Affect Budget Absorption In Government Institutions Of South Sulawesi</i>	X1 : Regulasi Keuangan X2:Perencanaan Anggaran X3:Kompetensi Aparatur X4:Lingkungan Birokrasi X5:Komitmen Organisasi Y:Penyerapan Anggaran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi keuangan, perencanaan anggaran, kompetensi aparatur, lingkungan birokrasi, dan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil ini berarti bahwa kepentingan masyarakat selalu membimbing pemerintah provinsi sulawesi selatan dalam

⁶⁰ Suharno & Kristanto Mastuti, "Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran, Lingkungan Birokrasi, Komitmen Manajemen, Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran," *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 13, no. September (2017): 367–377.

⁶¹ Wieske Anneleen Ratag, Anderson G. Kumenaung, and Daisy S.M. Engka, "Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Lingkungan Iniversitas Sam Ratulangi," *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 20, no. 2 (2019): 1.

				setiap aksi dan aktivitas sebagai prinsip dalam perencanaan dan proses pelaksanaan anggaran. ⁶²
7	Dadan Ramdani dan Indi Zaenur Anisa (2017)	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.	X1:Perencanaan Anggaran X2:Kualitas Sumber Daya Manusia X3:Pelaksanaan Anggaran Y:Penyerapan Anggaran	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Variabel Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten. ⁶³

1. Persamaan dan perbedaan penelitian Ratih dan Helmy (2013) dengan penelitian ini adalah :
 - a. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif serta membahas tentang dua variabel yang sama yaitu kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas

⁶² Darwis Lannai and Asbi Amin2, "Factors Affect Budget Absorption In Government Institutions Of South Sulawesi" Vol 3, No, no. 2 (2020): 113–119.

⁶³ Dadan Ramdhani and Indi Zaenur Anisa, "Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten," *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu* 10, no. 1 (2017): 134–148.

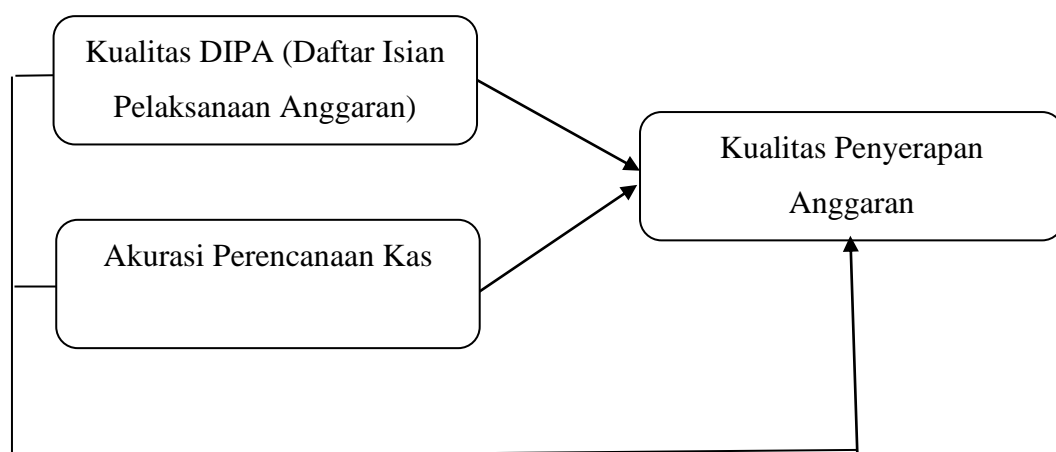
- b. Perbedaannya adalah terdapat perbedaan pada studi kasus serta populasi dan sampelnya. Serta metode pengambilan sampelnya menggunakan metode probabilitas yakni penyampelan acak sederhana.
2. Persamaan dan perbedaan penelitian Irma Aldina (2016) dengan penelitian ini adalah :
 - a. Persamaan adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif serta memiliki kesamaan variabel X1 yaitu Kualitas DIPA.
 - b. Perbedaannya adalah penelitian Irma Aldina (2016) menggunakan lebih banyak variabel X yaitu Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja sementara penelitian ini hanya menggunakan dua variabel saja yaitu Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas, dan perbedaann lainnya adalah populasi dan sampelnya, penelitian Irma Aldina (2016) menggunakan populasi dan sampel seluruh SKPD yang ada di kota padang sementara penelitian ini hanya menggunakan populasi dan sampel yaitu seluruh pegawai yang ada di BPKAD Kota Medan.
3. Persamaan dan perbedaan Penelitian Heru Suwito (2017) dengan penelitian ini adalah :
 - a. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif serta membahas tentang dua variabel yang sama yaitu kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas.
 - b. Perbedaannya adalah terdapat perbedaan pada objek penelitiannya serta data yang digunakan oleh Heru Suwito (2017) menggunakan data sekunder sementara penelitian ini menggunakan data primer.
4. Persamaan dan perbedaan penelitian Delnita Lilik Mastuti, et.al (2017) dengan penelitian ini adalah :
 - a. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuisisioner skala *likert* dan mempunyai variabel Y yang sama yaitu penyerapan anggaran, serta sama-sama menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda.

- b. Perbedaannya adalah peneliti tersebut menggunakan variabel independen karakteristik tujuan anggaran, lingkungan birokrasi, komitmen manajemen, dan kualitas sumber daya manusia, sementara dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel tersebut dan hanya menggunakan variabel independen kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas.
5. Persamaan dan perbedaan penelitian Wieske Anneleen Ratag, et.al (2019) dengan penelitian ini adalah :
 - a. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan mempunyai variabel Y yang sama yaitu penyerapan anggaran, serta sama-sama menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda.
 - b. Perbedaannya adalah penelitian tersebut menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder serta memakai uji auto korelasi untuk data sekunder sementara dalam penelitian ini hanya menggunakan satu data saja yaitu data primer dan tidak menggunakan uji auto korelasi.
6. Persamaan dan perbedaan penelitian Darwis Lannai dan Asbi Amin (2020) dengan penelitian ini adalah :
 - a. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan mempunyai variabel Y yang sama yaitu penyerapan anggaran, serta sama-sama menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda.
 - b. Perbedaannya adalah penelitian tersebut menggunakan populasi dan sampel ODP yang ada di provinsi Sulawesi Selatan yaitu sekitar 27 Dinas sementara penelitian ini hanya menggunakan populasi dan sampel yaitu seluruh pegawai yang ada di BPKAD Kota Medan. Dan juga penelitian tersebut lebih banyak menggunakan variabel X atau independen sementara dalam penelitian ini hanya menggunakan dua variabel X saja.
7. Persamaan dan perbedaan penelitian Dadan Ramdhani dan Indi Zaenur Anisa (2017) dengan penelitian ini adalah :

- a. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan mempunyai variabel Y yang sama yaitu penyerapan anggaran, serta sama-sama menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda.
- b. Perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih banyak menggunakan variabel X atau independen sementara dalam penelitian ini hanya menggunakan dua variabel X saja serta penelitian tersebut menggunakan populasi dan sampel ODP yang ada di provinsi banten dan juga menggunakan teknik sampling *purposive sampling* sementara penelitian ini hanya menggunakan populasi dan sampel yaitu seluruh pegawai yang ada di BPKAD Kota Medan dan menggunakan teknik sampling jenuh.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kemampuan seseorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berfikirnya dalam menyusun secara sistematis. Sesuai dengan gambar kerangka konseptual (Gambar 2.2), maka dapat dijelaskan bahwa variabel Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) berpengaruh terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran. Serta juga variabel Akurasi Perencanaan Kas berpengaruh terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran.



Gambar 2.2
Kerangka Konseptual

D. Hipotesa

Hipotesa dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua variabel yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan secara logis. Berdasarkan kerangka teoritis dan kerangka konseptual yang sudah diuraikan di atas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- Ha₁ : Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) berpengaruh terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
- Ho₁ : Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
- Ha₂ : Akurasi Perencanaan Kas berpengaruh terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
- Ho₂ : Akurasi Perencanaan Kas tidak berpengaruh terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
- Ha₃ : Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan Akurasi Perencanaan Kas berpengaruh terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran secara simultan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
- Ho₃ : Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan Akurasi Perencanaan Kas tidak berpengaruh terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran secara simultan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih variabel.⁶⁴ Peneliti menggunakan pendekatan asosiatif karena pertanyaan dalam penelitian ini bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel, kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial. Untuk dapat melakukan pengukuran, setiap fenomena sosial dijabarkan ke dalam beberapa komponen masalah, variabel, dan indikator. Setiap variabel yang ditentukan diukur dengan memberikan simbol-simbol angka yang berbeda-beda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan variabel tersebut. Dengan menggunakan simbol-simbol angka tersebut, teknik perhitungan secara kuantitatif matematik dapat dilakukan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter.⁶⁵

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Medan tepatnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, di Jalan Kapten Maulana Lubis, No. 2, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan Agustus 2020 - Februari 2021.

⁶⁴ Chris H Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2017). h. 16

⁶⁵ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Medan: Febi Press UINSU, 2016). h. 7

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2020					Tahun 2021		
		Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Pengajuan Judul Skripsi								
2	Bimbingan Proposal Skripsi								
3	Seminar Proposal								
4	Penelitian								
5	Bimbingan Skripsi								
6	Sidang Munaqasah								

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶⁶ Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebanyak 80 orang pegawai yang bekerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dijelaskan dalam Tabel 3.2. sebagai berikut.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 31

Tabel 3.2
Daftar Jumlah Pegawai

No	Keterangan	Jumlah
1	Kepala BPKAD	1
2	Sekretaris BPKAD	1
3	Sub Bagian Umum	12
4	Sub Bagian Aset dan Investasi	9
5	Sub Bagian Penyusunan Program	7
6	Sub Bidang Pendapatan	5
7	Sub Bidang Belanja Langsung	8
8	Sub Bidang Belanja Tidak Langsung	6
9	Bidang Perbendaharaan	7
10	Sub Bidang Gaji	7
11	Sub Bidang Verifikasi dan Kas	8
12	Sub Bidang Akuntansi	5
13	Sub Bidang Pelaporan	4
	Jumlah	80

2. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Di sini sampel harus benar-benar bisa mencerminkan keadaan populasi, artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi.⁶⁷

Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Adapun teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *Sampling Jenuh*. *Sampling jenuh* yaitu suatu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.⁶⁸ Apabila jumlah responden kurang dari 100 responden,

⁶⁷ Helmina Andriani Hardani et al., “Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif,” Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group (2020). h. 362

⁶⁸ *Ibid.*

sampel diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jadi jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 80 responden.

D. Data Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif, yaitu jenis data yang diperoleh dari perusahaan berupa angka atau bilangan sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui.⁶⁹

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁷⁰ Data ini diperoleh dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau kuisioner yang nantinya akan diisi oleh responden yang terdiri dari pegawai pada level yang acak yang bekerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan tentang Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan Akurasi Perencanaan Kas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara objektif, terperinci, dan baik sesuai dengan kejadian dan permasalahan yang ada, maka metode atau teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket atau kuisioner. Angket atau kuisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.⁷¹ Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi

⁶⁹ Achmad Sani Supriyanto, "Metodologi Riset Manajemen Sumber Daya Manusia" (UIN-maliki Press, 2010). h. 201

⁷⁰ Husein Umar, "Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis Edisi Kedua," Jakarta: PT RajaGrafindo Persada (2008). h. 42

⁷¹ Supriyanto, "Metodologi Riset Manajemen Sumber Daya Manusia." h. 199

yang lebih akurat dari responden. Kuisioner diambil dari hasil penelitian terdahulu yang telah diuji oleh peneliti.⁷²

Pengukuran variabel-variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dimana responden menyatakan pendapatnya terhadap pernyataan. Setiap pertanyaan tersebut disertai 5 alternatif jawaban yang harus dipilih responden dan setiap jawaban tersebut dinilai dengan angka sebagai berikut :

1. Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor : 5
2. Jawaban Setuju (S) diberi skor : 4
3. Jawaban Netral (N) diberi skor : 3
4. Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor : 2
5. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor : 1

Data yang diperoleh dalam penelitian ini perlu dianalisis lebih lanjut agar data tersebut dapat ditarik kesimpulannya yang tepat, yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan dan keandalan data dalam penelitian ini yang harus diuji validitas dan reliabilitasnya.

F. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai cara-cara tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur (mengoperasionalkan) *construct* menjadi variabel peneliti yang dapat dituju.⁷³ Variabel penelitian adalah suatu sifat yang dapat memiliki berbagai macam nilai. Kalau diekspresikan secara berlebihan, variabel adalah sesuatu yang bervariasi. Variabel biasanya diekspresikan dalam bentuk simbol/lambang (umumnya digunakan simbol x dan y) yang padanya dilekatkan bilangan atau nilai.⁷⁴

Ada dua macam variabel dalam penelitian ini, yaitu :⁷⁵

⁷² Sulianto, *Metode Riset Bisnis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006). h. 134

⁷³ Supriyanto, "Metodologi Riset Manajemen Sumber Daya Manusia.", h. 200

⁷⁴ Arfan Ikhsan, "Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi Dan Manajemen" (Citapustaka Media, 2014). h. 66

⁷⁵ *Ibid.*, h. 67

1. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen (*dependent variables*) atau variabel terikat merupakan jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel ini secara matematis disimbolkan dengan huruf *y*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Penyerapan Anggaran (Y).

2. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen (*independent variables*) disebut juga dengan variabel bebas merupakan jenis variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel dependen yang diduga sebagai akibatnya. Variabel ini secara matematis disimbolkan dengan huruf *x*. Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yang tergolong dalam variabel independen yaitu Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) (X1), dan Akurasi Perencanaan Kas (X2).

Definisi operasional variabel penelitian dijelaskan pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel Penelitian

No	Jenis Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Kualitas Penyerapan Anggaran (Y)	Suatu estimasi pada realisasi anggaran dalam mencapai target pemerintah daerah dalam mewujudkan dan penilaian kinerja pemerintah daerah yang akuntabilitas dan transparansi dalam satu periode tahun anggaran.	1. Prosentase hasil yang dicapai dari penyerapan anggaran 2. Penyerapan anggaran per tri wulan 3. Waktu/jadwal realisasi anggaran setiap bulan 4. Hasil yang sesuai dalam pelaksanaan program anggaran	<i>Likert.</i>

No	Jenis Variabel	Definisi	Indikator	Skala
2	Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) (X1)	Suatu dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam pencairan dana pada waktu yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak memiliki tanda bintang atau blokir pada pencairan dana atas kegiatan atau program pemerintah. ⁷⁶	1. Kesesuaian dengan kebutuhan dari masing2 kegiatan 2. Kesesuaian dengan aturan yang berlaku 3. Mudah dipahami oleh pejabat/pegawai 4. Kesalahan administratif 5. Ketepatan waktu dalam penetapan	<i>Likert.</i>
3	Akurasi Perencanaan Kas (X2)	Tingkat ketepatan/kesesuaian antara perencanaan kas dengan realisasi kas yang terjadi. Pengukuran konsep akurasi perencanaan kas ini dilakukan dengan mengukur nilai deviasi antara perkiraan dengan nilai SPM satker yakni	1. Keterlibatan semua bagian terhadap anggaran yang ditetapkan. 2. Ketepatan data 3. Pendekatan dan instrumen dalam penyusunan anggaran 4. Kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara/daerah	<i>Likert.</i>

⁷⁶ Irma Aldina, "Pengaruh Kualitas DIPA, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris Pada SKPD di Kota Padang)", *Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 2016, h. 12

		membandingkan jumlah perkiraan penarikan dana dengan nilai SPM pada periode dimaksud.	untuk menghubungkan pengadaan barang dalam melakukan tindakan yang akan datang 5. Antisipasi terhadap <i>perubahan</i> kondisi dan prioritas kebutuhan.	
--	--	---	--	--

G. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda, karena membahas tentang dua buah variabel independen dan satu buah variabel dependen. Untuk mendukung hasil dan akurasi penelitian, data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan alat statistik melalui bantuan program SPSS (*Statistical Package for the Social Science*) Versi 23.0, kemudian dijelaskan secara deskriptif.

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan model penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Dengan analisis deskriptif, dimungkinkan untuk melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal.⁷⁷ Penelitian ini menjabarkan jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari setiap variabel.

⁷⁷ Arfan Ikhsan, et.al., *Metodologi Penelitian Bisnis dan Manajemen*, h. 33

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Validitas merupakan produk dari validasi.⁷⁸ Validasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh penyusun atau pengguna instrumen untuk mengumpulkan data secara empiris guna mendukung kesimpulan yang dihasilkan oleh skor instrumen. Sedangkan validitas adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur sasaran ukurnya. Dalam mengukur validitas perhatian ditujukan pada isi dan kegunaan instrumen. Validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu item dikatakan jika pernyataan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Agar data yang diperoleh bisa relevan/sesuai dengan tujuan uji validitas yang digunakan adalah dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor setiap konstruksinya. Metode yang digunakan adalah dengan membandingkan antara nilai korelasi atau r_{hitung} dari variabel penelitian dengan nilai r_{tabel} . Data dikatakan valid apabila korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor setiap konstruksinya signifikan pada 0,05 atau 0,01 maka pertanyaan tersebut dikatakan valid.⁷⁹

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebagai alat ukur yang berkenan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data yang dihasilkan dari proses pengumpulan data dengan menggunakan instrumen.⁸⁰ Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar suatu pengukuran mengukur dengan stabil atau konsisten. Instrumen dipercaya jika jawaban dari responden atas pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji ini dilakukan dengan menggunakan koefisien *cronbach alpha*. Kriteria suatu instrumen penelitian

⁷⁸ Eurika Pendidikan, "Pengertian Uji Validitas Dan Reliabilitas Secara Empirik," accessed September 11, 2020, <https://eurekapendidikan.com/pengertian-uji-validitas-dan-reliabilitas-empirik-teoritik>.

⁷⁹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011). h. 21

⁸⁰ Sukaria Sinulingga, *Metodologi Penelitian* (Medan: USU Press, 2015). h. 229

dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini, apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60.⁸¹

3. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik adalah uji statistik untuk mengukur sejauh mana sebuah model regresi dapat disebut sebagai model yang baik. Model regresi disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi-asumsi klasik yaitu multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas.⁸² Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi telah memenuhi kriteria ekonometrika, dalam arti tidak terjadi penyimpangan yang cukup serius dari asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam metode *Ordinary Lest Square* (OLS). Setidaknya terdapat empat uji asumsi yang harus dilakukan :

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Alat uji yang digunakan adalah dengan analisis grafik histogram, grafik *normal probability plot* serta uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov (1-sample K-S)*.⁸³

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik normal probability plot adalah :

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi syarat normalitas.

⁸¹ Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2016). h. 173

⁸² Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*. h. 93

⁸³ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Semarang: UNDIP, 2009). h. 51

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garisdiagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirmov Z (I-Sample K-S) adalah :

- 1) Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ atau 5% maka data terdistribusi secara normal.
- 2) Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ atau 5% maka data tidak terdistribusi normal.⁸⁴

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat diantara variabel-variabel independen yang diikutsertakan dalam pembentukan model. Dasar pengambilan keputusan model regresi yang baik atau Untuk mendeteksi apakah model regresi linear mengalami multikolinearitas dapat diperiksa menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance Value*. Batas dari *Tolerance Value* adalah $> 0,10$ dari *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 .⁸⁵

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heterokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Metode yang digunakan untuk mengkaji ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai variabel dependen (ZPRED) dengan nilai residual (SRESID). Dasar analisis ini adalah Titik-titik tersebar di atas dan di bawah atau sekitar angka 0 dan data tidak boleh membentuk pola

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Natak Rizwanto, "Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Analysis," *Artikel Ilmiah Mahasiswa* (2016). h. 4

bergelombang melebur kemudian menyempit dan melebur kembali dan Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.⁸⁶

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) (X1), dan akurasi perencanaan kas (X2) terhadap kualitas penyerapan anggaran (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata dari variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.⁸⁷

Rumus regresi yang digunakan adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

a	= Konstanta
X_1	= Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)
X_2	= Akurasi Perencanaan Kas
Y	= Kualitas Penyerapan Anggaran
b_1, b_2	= Koefisien regresi untuk X_1 dan X_2
e	= Faktor Gangguan

5. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut.⁸⁸ Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam

⁸⁶ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan : FEBI UINSU PRESS, 2016), h. 98

⁸⁷ *Ibid*, h. 184

⁸⁸ Laylan Syafina, "Panduan Penelitian Kuantitatif Akuntansi" (Medan: Febi Press, 2018). h. 35

menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat.⁸⁹ Uji hipotesis terdiri dari beberapa uji yaitu sebagai berikut :

a. Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien Determinan (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinan adalah diantara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.⁹⁰

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji t atau lebih dikenal dengan sebutan uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variabel terikat.⁹¹ Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai t hitung $> t$ tabel dan nilai Sig. t $< \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai t hitung $< t$ tabel dan nilai Sig. t $> \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau lebih dikenal dengan uji simultan adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.⁹² Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah :

⁸⁹ *Ibid*, h. 36

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid*, h. 39

⁹² *Ibid*, h. 37

- 1) Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ dan nilai $\text{Sig. } F < \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ dan nilai $\text{Sig. } F > \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Medan

Pemerintah Kota Medan yang merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sumatera Utara yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kota Medan maka diharapkan Kota Medan mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Medan. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Medan, maka nantinya akan mampu meningkatkan pajak daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Secara geografis, Kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan langsung dengan Selat Malaka dibagian Utara, sehingga relatif dekat dengan kota-kota/negara yang lebih maju seperti Pulau Penang Malaysia, Singapura dan lain-lain. Demikian juga secara demografis Kota Medan diperkirakan memiliki pangsa pasar barang dan jasa yang relatif besar dimana tahun 2007 telah mencapai 2.083.156 jiwa. Demikian juga secara ekonomis dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor tertier dan sekunder, Kota Medan sangat potensial berkembang menjadi pusat perdagangan dan keuangan regional Nasional.

a. Geografi dan Demografi

Karakteristik Kota Medan didukung oleh luas wilayah 265,10 km² atau 3,6 persen dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Secara administratif, Kota Medan berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara, dan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur, barat, serta selatan. Kota Medan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. memiliki posisi strategis yang semakin menguat baik secara regional maupun nasional. Posisi ini menjadi modal dasar dalam

pembangunan kota. Kota Medan, sebagai salah satu pusat perekonomian regional terpenting di pulau Sumatera dan salah satu dari tiga kota metropolitan baru memiliki posisi strategis yang semakin menguat baik secara regional maupun nasional. Posisi ini menjadi modal dasar dalam pembangunan kota.

Kota Medan sebagai salah satu pusat perekonomian regional terpenting di pulau Sumatera dan salah satu dari tiga kota metropolitan baru di Indonesia, memiliki kedudukan, fungsi dan peranan strategis sebagai pintu gerbang utama bagi kegiatan jasa perdagangan dan keuangan secara regional/internasional di kawasan barat Indonesia, yang didukung oleh ketersediaan Bandara Polonia dan Pelabuhan Laut Belawan serta infrastruktur dan utilitas kota lainnya. Kota Medan secara administratif pemerintahan saat ini terdiri dari 21 Kecamatan dengan 151 Kelurahan, yang terbagi atas 2.001 lingkungan. Berdasarkan batas wilayah administratif, Kota Medan relatif kecil dibanding kota lainnya, tetapi posisi secara ekonomi regional Kota Medan sangat penting karena berada dalam wilayah hinterland dengan basis ekonomi sumber daya alam yang relatif besar dan beragam, serta dukungan kepelabuhanan.

Dibanding kota besar lainnya, Kota Medan memiliki keterbatasan ruang sebagai akibat bentuk wilayah administratif yang ramping ditengah. Dengan keterbatasan ruang tersebut, daya dukung lingkungan perkotaan menjadi kurang optimal terutama hambatan alamiah dalam pengembangan wilayah utara Kota Medan, khususnya dalam penyediaan prasarana dan sarana perkotaan. Kondisi tersebut juga menyebabkan cenderung kurang seimbangnya dan kurang terpadunya penataan ruang kota di bagian utara dan bagian selatan.

b. Lambang Kota Medan



Gambar 4.1

Lambang Kota Medan

Makna dari lambang Kota Medan di atas adalah sebagai berikut :

1. 17 biji padi berarti tanggal 17 dari hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
2. 8 bunga kapas berarti bulan 8 dari tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
3. 4 tiang dan 5 bahagian dari perisai berarti tahun 45 dari Proklamasi Indonesia.
4. Satu bambu runcing yang terletak dibelakang perisai adalah lambang perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia, dan lima bahan-bahan pokok yang terpenting dihadapan bambu runcing berarti Kemakmuran serta Keadilan Sosial yang merata ada dihadapan kita.
5. Bintang yang bersinar lima adalah Bintang Nasional yang berarti bahwa hidup penduduk Kota Medan khususnya dan Indonesia

umumnya akan bersinar-sinar bahagia dan lepas dari kemiskinan dan kemelaratan.

6. Lima sinar bintang berarti lima bahan pokok terpenting yang diekspor dari Kota Medan dan lima bahagian perisasi berarti Pancasila yang menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.

c. Visi dan Misi

Visi Kota Medan adalah "Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius".

Misi Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama

Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.

2. Kreatifitas dan Inovasi

Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.

3. Kebhinekaan

Mengembangkan kepribadian masyarakat kota bersarakan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

4. Penanggulangan Kemiskinan

Meningkatkan percepatan dan perluasan program penanggulangan kemiskinan.

5. Multikulturalisme

Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, perstuan dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan

daerah dan identitas lokal multikulturalisme.

6. Tata ruang kota yang konsisten

Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.

7. Peningkatan Kesempatan Kerja

Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

8. *Smart City*

Mengembangkan Medan sebagai *Smart City*.

2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

a. Sejarah Singkat

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dahulu masih berupa unit kerja yang kecil yaitu bagian keuangan sekretariat daerah kota Medan dengan tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah kota Medan. Mengingat pada saat itu potensi tugas pengelolaan keuangan pemerintah kota Medan belum begitu kompleks maka bagian keuangan kota Medan terdiri dari 5 sub bagian yaitu anggaran, perbendaharaan, gaji, verifikasi, dan pembukuan. Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk kota Medan, maka melalui peraturan daerah Kota Medan No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Perda No. 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, bagian keuangan sekretariat daerah kota Medan yang terdiri dari 5 bagian tersebut ditingkatkan menjadi badan pengelola daerah keuangan yang tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah Kota Medan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang mampu sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan yang baik (good governance). Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional guna pengawasan dan akuntabilitas, kualitas serta penyusunan pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintah Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik, berdayaguna dan berhasilguna yang didukung dengan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta standar operasional dan prosedur (SOP).

Organisai BPKAD Kota Medan terdiri dari :

- A. Badan
- B. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program
- C. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pendapatan
 - b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
 - c. Sub Bidang Belanja Langsung
- D. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Gaji
 - b. Sub Bidang Belanja
 - c. Sub Bidang Verifikasi dan Kas

E. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :

- a. Sub Bidang Akuntansi
- b. Sub Bidang Pelaporan

F. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

G. Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan berdiri pada tanggal 28 Desember 2011. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan diterapkan mulai 2011-2015.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintah Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik, berdayaguna dan berhasilguna yang didukung dengan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta standar operasional dan prosedur (SOP). Sejalan dengan Visi dan Misi Kota Medan, maka Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan Tahun 2011-2015 sebagai berikut :

“Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Medan Yang Profesional, Berwawasan Manajemen Pngelolaan Keuangan Yang Sistematis, Efisien Dan Efektif”.

Ketiga Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan di atas dapat dijelaskan dengan rasionalitas sebagai berikut :

1. Peningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Aparatur Pemerintah Kota Medan.

Dengan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran merupakan penunjang kelancaran tugas – tugas pelayanan bagi aparatur sebagai aparatur Pemerintah Kota Medan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan sumber daya manusia (SDM) maka pelayanan administrasi dan aparatur dapat

berjalan sesuai program dan rencana kerja yang telah disusun dan dapat menerapkan mutu pelayanan administrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kota Medan.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan harus memiliki manfaat tepat guna yang berbasis kinerja sehingga dapat terlihat dari hasil pekerjaan yang dilakukan sehingga aparatur pemerintah semakin memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, maupun pengalaman yang sesuai dengan ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab yang diemban sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas transparan, efisien dan efektif.

3. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik.

Terkait dengan salah satu tujuan organisasi Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pemerataan pelayanan umum Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat dengan pelayanan yang prima, terjangkau, dan adil maka disadari bahwa pada prakteknya, tujuan itu hanya dapat tercapai oleh sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan yang secara langsung berinteraksi dengan sistem teknologi yang harus diketahui oleh aparatur dan menyadari tugas pelayanan yang harus dilakukannya. Oleh karenanya motivasi, disiplin dan kualitas sumber daya aparatur sangat dibutuhkan guna mendukung penerapan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang baik.

4. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan.

Bahwa untuk dapat tercapainya tujuan organisasi Kinerja organisasi akan selalu ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia

dalam organisasi yang bersangkutan disamping adanya peran penting faktor-faktor lain. Oleh karena itu, peningkatan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan mutlak harus dilakukan.

Dalam batasan Misi di atas, peningkatan kinerja aparatur dapat terlepas dari makna peningkatan produktifitas kerja aparatur Pemerintah Kota Medan sehingga terbebas dari pemborosan dan ketidakefisienan. Menempatkan aparatur pada suatu gugus kerja yang jelas, peningkatan karier dan kesejahteraan yang sesuai dengan prestasi aparatur, kepuasan kerja, budaya organisasi yang mendukung peningkatan kinerja dan sebagainya merupakan faktor-faktor yang secara simultan berkorelasi dalam proses peningkatan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

BPKAD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan. Badan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD).
- 2) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintah daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD).
- 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan.
- 4) Penyusunan dan penyelenggaraan administrasi keuangan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah.
- 5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah.

3. Deskripsi Data Penelitian

a. Uji Deskriptif

1) Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah seluruh pegawai yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Populasi dan Sampel penelitian ini sebanyak 80 orang. Deskriptif responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-Laki	39	48,8	48,8	48,8
Valid Perempuan	41	51,2	51,2	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa dari 80 orang responden, sebanyak 39 orang dengan persentase 48,8% berjenis kelamin laki-laki dan 41 orang dengan persentase 51,2% berjenis kelamin perempuan.

2) Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah seluruh pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 80 orang. Deskriptif responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan**

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SMA	6	7,5	7,5	7,5
D3	13	16,3	16,3	23,8
Valid S1	52	65,0	65,0	88,8
S2	9	11,3	11,3	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa dari 80 responden, sebanyak 6 orang dengan persentase 7,5% berijazah SMA, sebanyak 13 orang dengan persentase 16,3% berijazah D3, sebanyak 52 orang dengan persentase 65,0% berijazah S1, dan sebanyak 9 orang dengan persentase 11,3% berijazah S2.

3) Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Divisi Bagian Pekerjaan

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah seluruh pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 80 orang. Deskriptif responden berdasarkan divisi bagian pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Divisi Bagian
Pekerjaan

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Kepala BPKAD	1	1,3	1,3	1,3
Sekretaris BPKAD	1	1,3	1,3	2,5
Sub Bagian Umum	8	10,0	10,0	12,5
Sub Bagian Penyusunan Program	4	5,0	5,0	17,5
Sub Bidang Anggaran (Belanja Tidak Langsung)	9	11,3	11,3	28,7
Sub Bidang Anggaran (Belanja Langsung)	7	8,8	8,8	37,5
Sub Bidang Perbendaharaan	1	1,3	1,3	38,8
Sub Bidang Belanja	8	10,0	10,0	48,8
Sub Bidang Fasilitasi Gaji	6	7,5	7,5	56,3
Sub Bidang Kas	16	20,0	20,0	76,3
Sub Bidang Akuntansi	1	1,3	1,3	77,5
Sub Bidang Pembukuan	4	5,0	5,0	82,5
Sub Bidang Pelaporan	5	6,3	6,3	88,8
Sub Bidang Aset dan Investasi	1	1,3	1,3	90,0
Sub Bidang Pendataan dan Inventarisasi	3	3,8	3,8	93,8
Sub Bidang Pembiayaan dan Investasi	2	2,5	2,5	96,3
Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan	3	3,8	3,8	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa dari 80 responden, sebanyak 1 orang dengan persentase 1,3% merupakan kepala BPKAD, sebanyak 1 orang dengan persentase 1,3% merupakan sekretaris BPKAD, sebanyak 8 orang dengan persentase 10,0% merupakan

pegawai sub bagian umum, sebanyak 4 orang dengan persentase 5,0% merupakan pegawai sub bagian penyusunan program, sebanyak 9 orang dengan persentase 11,3% merupakan pegawai sub bidang anggaran (belanja tidak langsung), sebanyak 7 orang dengan persentase 8,8% merupakan pegawai sub bidang anggaran (belanja langsung), sebanyak 1 orang dengan persentase 1,3% merupakan pegawai sub bidang perbendaharaan, sebanyak 8 orang dengan persentase 10,0% merupakan pegawai sub bidang belanja, sebanyak 6 orang dengan persentase 7,5% merupakan pegawai sub bidang fasilitasi gaji, sebanyak 16 orang dengan persentase 20,0% merupakan pegawai sub bidang kas, sebanyak 1 orang dengan persentase 1,3% merupakan pegawai sub bidang akuntansi, sebanyak 4 orang dengan persentase 5,0% merupakan pegawai sub bidang pembukuan, sebanyak 5 orang dengan persentase 6,3% merupakan pegawai sub bidang pelaporan, sebanyak 1 orang dengan persentase 1,3% merupakan pegawai sub bidang aset dan investasi, sebanyak 3 orang dengan persentase 3,8% merupakan pegawai sub bidang pendataan dan inventarisasi, sebanyak 2 orang dengan persentase 2,5% merupakan pegawai sub bidang pembiayaan dan investasi, dan yang terakhir sebanyak 3 orang dengan persentase 3,8% merupakan pegawai sub bidang pengendalian dan pengawasan.

4) Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah seluruh pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 80 orang. Deskriptif responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 30-34 Tahun	15	18,8	18,8	18,8
35-39 Tahun	19	23,8	23,8	42,5
40-44 Tahun	19	23,8	23,8	66,3
45-49 Tahun	5	6,3	6,3	72,5
50-54 Tahun	10	12,5	12,5	85,0
55-59 Tahun	12	15,0	15,0	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa dari 80 responden, sebanyak 15 orang dengan persentase 18,8% yang berusia 30-34 tahun, sebanyak 19 orang dengan persentase 23,8% yang berusia 35-39 tahun, sebanyak 19 orang dengan persentase 23,8% yang berusia 40-44 tahun, sebanyak 5 orang dengan persentase 6,3% yang berusia 45-49 tahun, sebanyak 10 orang dengan persentase 12,5% yang berusia 50-54 tahun, dan yang terakhir sebanyak 12 orang dengan persentase 15,0% yang berusia 55-59 tahun.

b. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Deskriptif kategori variabel menggambarkan tanggapan responden mengenai Pengaruh Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran. Analisis deskriptif ini terdiri dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Berikut ini adalah hasil analisis statistik

deskriptif dari data penelitian ini yang diolah :

Tabel 4.5
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)	80	27,00	35,00	33,2000	2,40990
Akurasi Perencanaan Kas	80	26,00	35,00	32,4000	2,72634
Kualitas Penyerapan Anggaran	80	23,00	35,00	30,2125	2,98390
Valid N (listwise)	80				

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel di atas terdapat 7 pertanyaan di setiap variabel dengan jumlah responden berjumlah 80 orang. Kualitas DIPA (X1) responden memiliki nilai minimum 27 dan nilai paling tinggi 35. Nilai rata-rata Kualitas DIPA masing-masing responden sebesar 33,2000 dengan simpangan baku atau penyebaran rata-rata sebesar 2,40990. Akurasi Perencanaan Kas (X2) responden memiliki nilai minimum 26 dan nilai paling tinggi 35. Nilai rata-rata Akurasi Perencanaan Kas masing-masing responden sebesar 32,4000 dengan simpangan baku atau penyebaran rata-rata sebesar 2,72634. Dan Kualitas Penyerapan Anggaran (Y) responden memiliki nilai minimum 23 dan nilai paling tinggi 35. Nilai rata-rata Kualitas Penyerapan Anggaran masing-masing responden sebesar 30,2125 dengan simpangan baku atau penyebaran rata-rata sebesar 2,98390.

4. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan sebagai alat pengumpul data. Untuk uji validitas kuisisioner dilakukan dengan membandingkan r hitung atau nilai *Pearson Correlation* dengan membandingkan nilai r tabel. Apabila nilai r hitung $> r$ tabel (dengan sig. 0,05), maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Jadi apabila nilai r hitung atau nilai *Pearson Correlation* lebih kecil dari nilai r tabel maka butir pertanyaan dalam kuisisioner untuk variabel tersebut tidak valid atau jika r hitung $< r$ tabel (dengan sig. 0,05), maka kuisisioner tersebut tidak valid.

1) Variabel Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

Untuk itu dilakukan uji terhadap instrumen kepada 80 orang sampel, dengan menggunakan teknik *Pearson Correlation* dengan tingkat korelasi $\alpha = 0,05$ atau 5%.

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas DIPA (X1)

No	Item Pertanyaan	R-Hitung	R-Tabel (Taraf Sig. 5%)	Keterangan
1	Apabila terjadi revisi DIPA, tidak menjadi penyebab keterlambatan dalam penetapannya.	0,910	0,220	Valid
2	Dalam penyusunan anggaran, tidak terjadi salah penentuan akun DIPA.	0,768	0,220	Valid
3	Dalam pelaksanaan anggaran BPKAD Kota Medan mengacu kepada DIPA dan yang telah disahkan.	0,719	0,220	Valid

No	Item Pertanyaan	R-Hitung	R-Tabel (Taraf Sig. 5%)	Keterangan
4	Dokumen DIPA digunakan sebagai acuan dalam penyediaan dana.	0,746	0,220	Valid
5	BPKAD Kota Medan dalam pelaksanaan anggaran telah mengikuti prosedur dalam pelaksanaan pendapat dan belanja sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen DIPA.	0,552	0,220	Valid
6	DIPA mudah dipahami oleh pejabat/pegawai.	0,832	0,220	Valid
7	DIPA perlu direvisi karena tidak sesuai kebutuhan.	0,772	0,220	Valid

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Hasil analisis variabel Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) menunjukkan bahwa adanya 7 butir pertanyaan yang diajukan peneliti adalah Valid. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa butir pertanyaan dapat digunakan karena r hitung $>$ r tabel dengan taraf signifikan 5% sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.

2) Variabel Akurasi Perencanaan Kas

Untuk itu dilakukan uji terhadap instrumen kepada 80 orang sampel, dengan menggunakan teknik *Pearson Correlation* dengan tingkat korelasi $\alpha = 0,05$ atau 5%

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Variabel Akurasi Perencanaan Kas (X2)

No	Item Pertanyaan	R-Hitung	R-Tabel (Tarf Sig. 5%)	Keterangan
1	Dalam membuat perencanaan kas melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan program.	0,790	0,220	Valid
2	Perencanaan kas didukung dengan data yang valid berhubung dengan program yang bersangkutan.	0,779	0,220	Valid
3	Proses perencanaan kas sesuai dengan prosedur yang ada.	0,737	0,220	Valid
4	Perencanaan kas mengakomodir semua kebutuhan program/kegiatan.	0,757	0,220	Valid
5	Perencanaan kas dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan program/kegiatan berdasarkan peraturan yang berlaku.	0,795	0,220	Valid
6	Akurasi perencanaan kas perlu disiapkan agar keseimbangan dana yang dibutuhkan dapat terjaga.	0,733	0,220	Valid

7	Tingkat akurasi perencanaan kas sangat dipengaruhi oleh kecermatan pembuatan perkiraan penyetoran dan perkiraan pembayaran.	0,672	0,220	Valid
---	---	-------	-------	-------

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Hasil analisis variabel Akurasi Perencanaan Kas menunjukkan bahwa adanya 7 butir pertanyaan yang diajukan peneliti adalah valid. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa butir pertanyaan dapat digunakan karena r hitung $>$ r tabel sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.

3) Variabel Kualitas Penyerapan Anggaran

Untuk itu dilakukan uji terhadap instrumen kepada 80 orang sampel, dengan menggunakan teknik *Pearson Correlation* dengan tingkat korelasi $\alpha = 0,05$ atau 5%.

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Penyerapan Anggaran

No	Item Pertanyaan	R-Hitung	R-Tabel (Taraf Sig. 5%)	Keterangan
1	Penyerapan anggaran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.	0,732	0,220	Valid
2	Anggaran yang terealisasi di BPKAD Kota Medan, mencapai target penyerapan sesuai yang telah ditetapkan.	0,644	0,220	Valid
3	Capaian realisasi anggaran setiap triwulan, mencapai target proporsional sebesar 25%.	0,754	0,220	Valid

No	Item Pertanyaan	R-Hitung	R-Tabel (Taraf Sig. 5%)	Keterangan
4	Penyerapan anggaran tidak mengalami penumpukan di akhir tahun.	0,673	0,220	Valid
5	Evaluasi kinerja penyerapan belanja anggaran di BPKAD Kota Medan, dilakukan dengan membandingkan antara pagu anggaran dan realisasinya.	0,394	0,220	Valid
6	Pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen anggaran BPKAD Kota Medan dilakukan sesuai jadwal.	0,532	0,220	Valid
7	Dalam pelaksanaan anggaran telah mengikuti prosedur dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen DIPA dan Anggaran Kas.	0,539	0,220	Valid

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Hasil analisis variabel Kualitas Penyerapan Anggaran menunjukkan bahwa adanya 7 butir pertanyaan yang diajukan peneliti adalah valid. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa butir pertanyaan dapat digunakan karena $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.

b. Uji Reliabilitas

Selanjutnya terdapat uji reliabilitas. Suatu kuisioner dinyatakan reliabel jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu. Pengujian reliabilitas untuk variabel-variabel dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha*. Variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dikategorikan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60.

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Kualitas DIPA	0,880	0,60	Reliabel
Akurasi Perencanaan Kas	0,870	0,60	Reliabel
Kualitas Penyerapan Anggaran	0,730	0,60	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

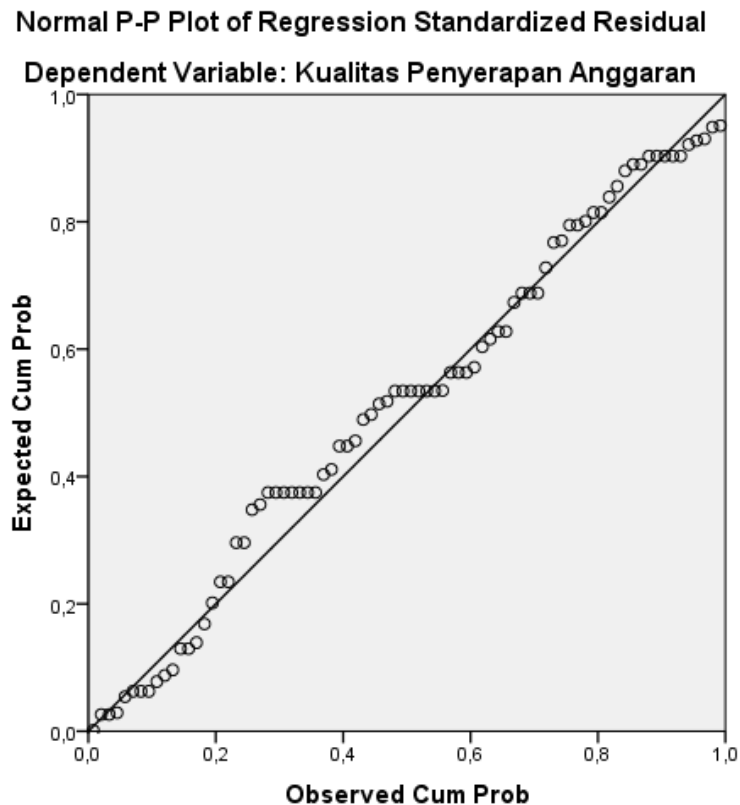
Berdasarkan tabel 4.9 di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dan pernyataan pada setiap variabel penelitian dinyatakan reliabel karena memiliki nilai cronbach's alpha yang lebih besar dari 0,60.

5. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada grafik normal P-P *Plot of Regression Standardized Residual* atau dengan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Distribusi data akan dikatakan normal apabila menghasilkan nilai residu lebih besar dari 0,05.⁹³

⁹³ Rochmat Adi Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Bersama SPSS* (Ponorogo: CV Wade Group, 2017). h. 108



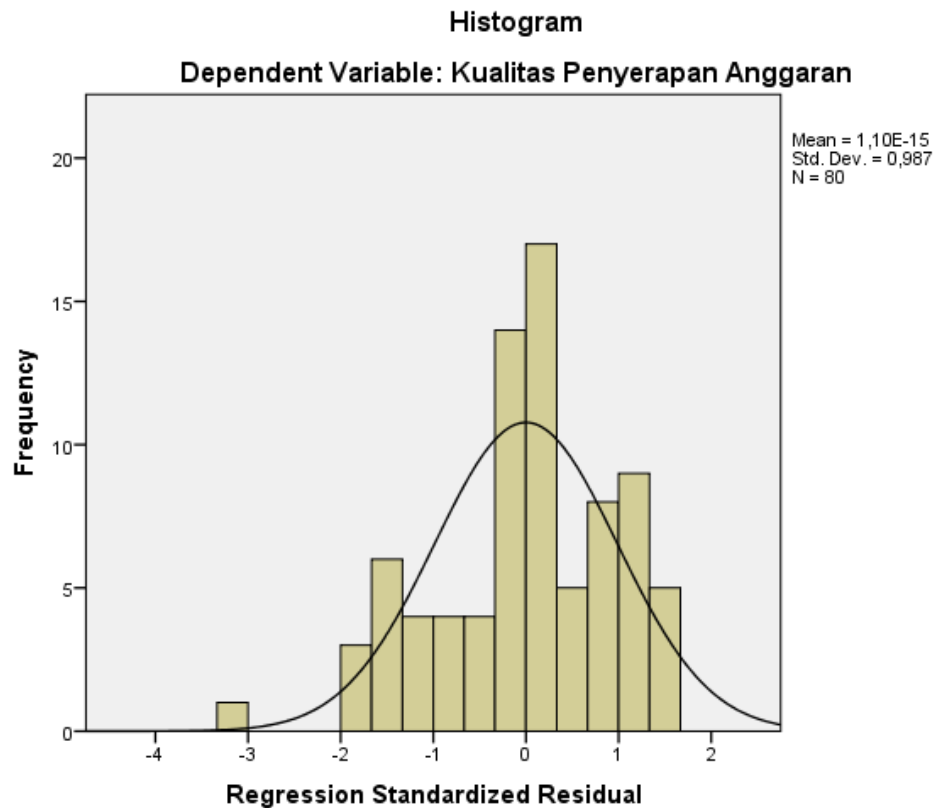
Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas dengan Normal *P-Plot*

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa titik-titik atau pola menyebar di sekitar diagonal dan mengikuti diagonal tersebut sehingga data penelitian telah terdistribusi normal dan juga telah memenuhi model regresi yang baik.

Hasil uji normalitas juga dapat dilihat pada diagram histogram pada gambar 4.2 sebagai berikut :



Gambar 4.2 Histogram

Dependen Variabel : Kualitas Penyerapan Anggaran

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan gambar 4.2 di atas uji normalitas dengan histogram dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel berdistribusi normal karena kurva histogram di atas berbentuk parabola dan bukan garis linear.

Selanjutnya adalah menggunakan perhitungan *Kolmogrov-Smirnov*. Apabila nilai *asymptotic significant (2-tailed)* lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data variabel telah berdistribusi normal. Hasil uji normalitas seluruh variabel menggunakan perhitungan *Kolmogrov-Smirnov* menggunakan *Software SPSS* dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,43923955
	Absolute	,098
Most Extreme Differences	Positive	,047
	Negative	-,098
Kolmogorov-Smirnov Z		,879
Asymp. Sig. (2-tailed)		,423

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Baik dilihat dari hasil uji normalitas seluruh variabel menggunakan perhitungan *Kolmogorov-Smirnov* nilai *asymptotic significant(2 – tailed)* di atas lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data variabel telah berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Hubungan linear antar variabel bebas disebut dengan Multikolinearitas. Dalam praktiknya, umumnya multikolinearitas tidak dapat dihindari. Dalam artian sulit menemukan dua variabel bebas yang secara matematis tidak berkorelasi ($korelasi = 0$) sekalipun secara substansi tidak berkorelasi. Secara umum, bila terjadi kolinearitas sempurna atau terjadi korelasi yang tinggi antar variabel bebas akan menyebabkan nilai determinan dari matriks $x'x$ akan mendekati 0 (akan sama dengan 0 jika korelasi sempurna), maka koefisien regresi tidak dapat diperoleh dikarenakan $(x'x)^{-1}$ tidak dapat dicari. Satu hal yang perlu ditekankan kembali disini bahwa multikolinearitas merupakan hubungan linear.⁹⁴

⁹⁴ Robert Kurniawan, *Analisis Regresi Dasar Dan Penerapannya* (Jakarta: Kencana, 2016).

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7,538	3,854		1,956	,054		
Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)	,282	,198	,228	1,425	,158	,340	2,939
Akurasi Perencanaan Kas	,411	,175	,376	2,352	,021	,340	2,939

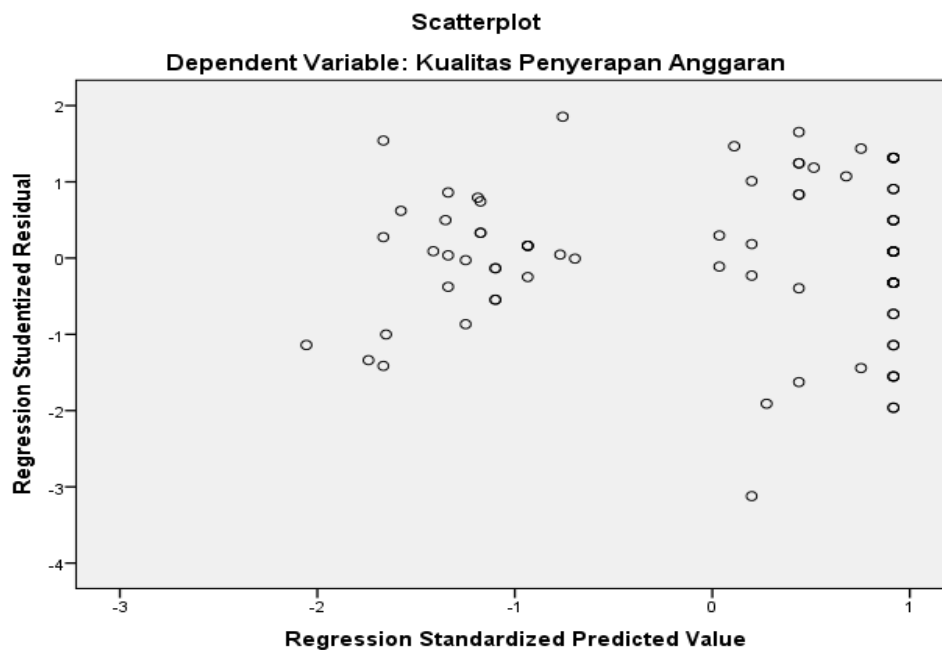
- a. Dependent Variable: Kualitas Penyerapan Anggaran
 Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk variabel Kualitas DIPA sebesar $2,939 < 10$, dan Akurasi Perencanaan Kas sebesar $2,939 < 10$. Dan untuk nilai *tolerance* Kualitas DIPA sebesar 0,340 dan Akurasi Perencanaan Kas sebesar 0,340 tidak lebih dari 0,1. Hal ini membuktikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat adanya multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu ke pengamat lain. Regresi yang baik harusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika *varians* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Jika titik-titik *scatter plot* membentuk pola-pola tertentu, maka

mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Namun jika titik-titik menyebar di atas dan bawah titik nol pada sumbu Y, maka tidak terdapat heteroskedastisitas.



Gambar 4.3

Uji Heteroskedastisitas dengan *Scatter Plot*

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan gambar 4.3 menunjukkan pola titik-titik pada grafik *scatter plot* tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah titik nol pada sumbu Y. Hal ini berarti pada model regresi penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kualitas penyerapan anggaran.

6. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.12
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7,538	3,854		1,956	,054		
Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)	,282	,198	,228	1,425	,158	,340	2,939
Akurasi Perencanaan Kas	,411	,175	,376	2,352	,021	,340	2,939

a. Dependent Variable: Kualitas Penyerapan Anggaran
Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Dari nilai-nilai koefisien di atas, dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Y = Kualitas Penyerapan Anggaran

X₁ = Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

X₂ = Akurasi Perencanaan Kas

e = Standart Error

Maka : $Y = 7,538 + 0,282X_1 + 0,411X_2$

Dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. Nilai *constant* (a) = 7,538 artinya apabila skor variabel Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas sama dengan nol, maka Kualitas Penyerapan Anggaran naik sebesar 7,538.
- b. Ketika variabel Kualitas DIPA (X₁) ditingkatkan sebesar 1%, maka Kualitas Penyerapan Anggaran akan meningkat sebesar 0,282 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan atau tidak mengalami perubahan.

- c. Ketika variabel Akurasi Perencanaan Kas (X_2) ditingkatkan sebesar 1%, maka Kualitas Penyerapan Anggaran akan meningkat sebesar 0,411 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan atau tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda tersebut, dapat diketahui, bahwa hubungan yang terjadi antara Kualitas DIPA dengan Kualitas Penyerapan Anggaran adalah hubungan yang negatif dimana ketika Kualitas DIPA ditingkatkan, maka akan berdampak pada penurunan Kualitas Penyerapan Anggaran. Dan hubungan yang terjadi antara Akurasi Perencanaan Kas dengan Kualitas Penyerapan Anggaran adalah hubungan yang bersifat positif, dimana ketika Akurasi Perencanaan Kas ditingkatkan, maka akan berdampak pada kenaikan Kualitas Penyerapan Anggaran.

7. Uji Hipotesis

a. Uji t (Uji Parsial)

Uji-t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Arah pengaruh variabel dilihat berdasarkan nilai koefisien regresinya. Jika nilai koefisien regresinya positif, berarti variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai koefisien regresinya negatif, berarti variabel independen berpengaruh negatif terhadap variabel dependen.

Tabel 4.13**Uji t****Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	7,538	3,854		1,956	,054		
Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)	,282	,198	,228	1,425	,158	,340	2,939
Akurasi Perencanaan Kas	,411	,175	,376	2,352	,021	,340	2,939

a. Dependent Variable: Kualitas Penyerapan Anggaran

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel di atas variabel Kualitas DIPA dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 1,425 dengan signifikansi sebesar 5% nilai t_{tabel} untuk jumlah data sebesar 80 (n) dan variabel bebas (k) sebanyak 2 dengan taraf signifikan 5% maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,991. Kemudian membandingkan jika $t_{hitung} >$ daripada t_{tabel} maka variabel tersebut dinyatakan tidak berpengaruh secara signifikan. Karena t_{hitung} untuk variabel X1 (1,425) lebih besar dari t_{tabel} (1,991) maka dapat dikatakan bahwa Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran, sehingga membuktikan bahwa H_{a1} ditolak dan H_{o1} ditolak.

Berdasarkan tabel di atas juga variabel Akurasi Perencanaan Kas (X2) dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,352 dengan signifikansi sebesar 5% nilai t_{tabel} untuk jumlah data sebesar 80 (n) dan variabel bebas (k) sebanyak 2 dengan taraf signifikan 5% maka diperoleh nilai t_{tabel}

sebesar 1,991. Kemudian membandingkan jika $t_{hitung} >$ daripada t_{tabel} maka variabel tersebut dinyatakan berpengaruh secara signifikan. Karena t_{hitung} untuk variabel X2 (2,352) lebih besar dari t_{tabel} (1,991) maka dapat dikatakan bahwa Akurasi Perencanaan Kas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran, sehingga membuktikan bahwa H_{a2} diterima dan H_{o2} ditolak.

b. Uji F (Uji Simultan)

Uji statistik F atau uji simultan merupakan kelayakan model/uji statistik untuk menunjukkan apakah secara bersama-sama atau keseluruhan dari koefisien regresi variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Dengan tingkat simultan signifikan sebesar 5% atau 0,05.

Tabel 4.14

Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	233,346	2	116,673	19,113	,000 ^b
	Residual	470,041	77	6,104		
	Total	703,388	79			

a. Dependent Variable: Kualitas Penyerapan Anggaran

b. Predictors: (Constant), Akurasi Perencanaan Kas, Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa nilai signifikan adalah sebesar 0,000 dan nilai F_{hitung} sebesar 19,113. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($Sig < 0,05$) maka kesimpulannya adalah signifikan. Terlihat pada tabel di atas diperoleh nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dari 0,05. Maka

keputusannya adalah signifikan. Artinya H_a diterima yang menunjukkan secara bersama-sama (simultan) seluruh variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Untuk nilai F_{hitung} dalam persamaan ini sebesar 19,113 adapun untuk nilai F_{tabel} untuk jumlah data sebanyak 80, dengan jumlah variabel bebas sebanyak 2 dan variabel terikat sebanyak 1 dan taraf signifikansi 5% maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,12 maka F_{hitung} (19,113) lebih besar daripada F_{tabel} (3,12) sehingga keputusan H_a diterima, yang artinya seluruh variabel bebas yang terdiri dari variabel Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, yaitu Kualitas Penyerapan Anggaran.

c. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji Determinan dilakukan untuk menjelaskan ketepatan model atau mengukur sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 mendekati satu variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen.

Berikut ini adalah nilai koefisien determinasi dari penelitian yang diperoleh dari hasil output SPSS.

Tabel 4.15

Uji Model R^2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,576 ^a	,332	,314	2,471

a. Predictors: (Constant), Akurasi Perencanaan Kas, Kualitas DIPA

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *R Square* sebesar 0,332. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas mampu menerangkan variabel terikat yaitu Kualitas Penyerapan Anggaran sebesar 33,2% sisanya 66,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, tabel pada uji t di atas menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 1,425 dengan signifikansi sebesar 5% nilai t_{tabel} untuk jumlah data sebesar 80 (n) dan variabel bebas (k) sebanyak 2 dengan taraf signifikan 5% maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,991. Kemudian kita membandingkan jika $t_{hitung} >$ daripada t_{tabel} maka variabel tersebut dinyatakan signifikan. Karena t_{hitung} untuk variabel X1 (1,425) lebih besar dari t_{tabel} (1,991) dengan nilai signifikansi sebesar $0,158 > 0,05$ maka keputusannya H_{a1} ditolak dan H_{o1} ditolak. Variabel Kualitas DIPA (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran (Y).

Dengan demikian hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian terdahulu karena penelitian terdahulu semuanya memiliki hasil yang berpengaruh.

2. Pengaruh Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, tabel pada uji t di atas menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,352 dengan signifikansi sebesar 5% nilai t_{tabel} untuk jumlah data sebesar 80 (n) dan variabel bebas (k) sebanyak 2 dengan taraf signifikan 5% maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,991. Kemudian kita membandingkan jika $t_{hitung} >$ daripada t_{tabel} maka variabel tersebut dinyatakan signifikan. Karena t_{hitung} untuk variabel X2 (2,352) lebih besar dari t_{tabel} (1,991) dengan nilai signifikansi sebesar $0,021 < 0,05$ maka keputusannya H_{a2} diterima dan H_{o2} ditolak. Variabel Akurasi Perencanaan Kas (X2) berpengaruh secara

signifikan terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran (Y). Akurasi Perencanaan Kas yang berkaitan dengan penyerapan anggaran mencakup keterlibatan semua bagian terhadap anggaran yang ditetapkan, ketepatan data, pendekatan dan instrumen dalam penyusunan anggaran sehingga meningkatkan Akurasi Perencanaan Kas yang baik yang dapat mewujudkan kualitas penyerapan anggaran yang sesuai dalam pelaksanaan anggaran.

Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Heru Suwito (2017) menunjukkan bahwa kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran.

3. Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil uji F dari kedua variabel bebas yaitu Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya ditemukan pada tabel di atas bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 dan F_{hitung} adalah 19,113. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($Sig < 0,05$) maka kesimpulannya adalah berpengaruh signifikan, selain itu kita bisa membandingkan antara nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan menentukan model. Jika F_{hitung} dalam persamaan ini sebesar 19,113 adapun nilai F_{tabel} dalam jumlah data sebanyak 80, dengan jumlah variabel bebas sebanyak 2 variabel dan variabel terikat sebanyak 1 variabel dengan taraf signifikan 5% maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,12, maka F_{hitung} (19,113) lebih besar daripada F_{tabel} (3,12) dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga keputusan H_{a3} diterima dan H_{o3} ditolak. Yang artinya seluruh variabel bebas yang terdiri dari Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat, yaitu Kualitas Penyerapan Anggaran.

Dengan demikian hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Heru Suwito (2017) menunjukkan bahwa kualitas DIPA dan

Akurasi Perencanaan Kas berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kualitas DIPA tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar $1,425 < t$ tabel sebesar $1,991$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,158 > 0,05$. Sehingga membuktikan bahwa H_{a1} ditolak dan H_{o1} ditolak.
2. Akurasi Perencanaan Kas berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar $2,352 < t$ tabel sebesar $1,991$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,021 < 0,05$. Sehingga membuktikan bahwa H_{a2} diterima dan H_{o2} ditolak.
3. Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas berpengaruh terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran secara simultan. Hal ini dapat dilihat dari nilai f hitung sebesar $19,113 > f$ tabel sebesar $3,12$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga membuktikan bahwa H_{a3} diterima dan H_{o3} ditolak. Dapat dikatakan bahwa Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas sudah baik dalam meningkatkan Kualitas Penyerapan Anggaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Untuk para pegawai BPKAD Kota Medan diharapkan untuk terus mempertahankan dan memaksimalkan penyerapan anggaran dengan meningkatkan kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan selain menerapkan metode survei melalui penyebaran kuisioner, juga melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.
3. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang penyerapan anggaran disarankan untuk dapat menambah variabel-variabel lainnya yang berhubungan dengan penyerapan anggaran. Tidak hanya sebatas pada variabel-variabel yang peneliti ambil untuk diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- 164/PMK.05/2011, Peraturan Menteri Keuangan Nomor. *Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran*, n.d.
- Abd al-Rasul, Ali. *Mabadi Al-Iqtishadi Fi Al-Islam*. Cet. 2. al-Qahirah: Dar Fikr al-Arabi, 1980.
- Abdul Mannan, Muhammad. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Adi Purnomo, Rochmat. *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Bersama SPSS*. Ponorogo: CV Wade Group, 2017.
- Adi, Tri. “Penyerapan Anggaran.” Accessed September 20, 2020. <https://analisis.kontan.co.id/news/penyerapan-anggaran>.
- Aldina, Irma. “Pengaruh Kualitas Dipa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris Pada SKPD Di Kota Padang).” *Jurnal Akuntansi* 4, no. 1 (2017): 4.
- Arno, Abdul Kadir. “Penyusunan Anggaran Perspektif Fiqih Anggaran Hukum Ekonomi Syariah,” 2018.
- Bahtiar, and Arif. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Basri, Ramlah. “Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1, no. 4 (2013).
- Bi Rahmani, Nur Ahmadi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: Febi Press UINSU, 2016.
- Don R, Hansen. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Eriyandi, Vina. “Implementasi Perencanaan Kas Sebagai Upaya Untuk

Menciptakan Realisasi Anggaran Yang Proporsional Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda Tahun Anggaran 2011.” *Ekonomia* 1, no. 1 (2013): 162–166.

Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: UNDIP, 2009.

———. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.

H Timotius, Chris. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2017.

Handayani, Ratih. *Pengantar Studi Dan Administrasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988.

Harahap, Isnaini, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, and Rahmi Syariza. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Prenada Media, 2017.

Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sykmana, and Nur Hikmatul Auliya. “Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.” *Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group* (2020).

Harmain, Hendra, Anggriyani Anggriyani, Rasidah Rasidah, Nurlaila Nurlaila, Hastuti Olivia, Desy Farina, Herry Wahyudi, and Laylan Syafina. “Akuntansi Syariah Di Indonesia” (2019).

Haryanto. *Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Pendekatan Kinerja*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.

Haryanto, J Dodik, and Adithya Bayu Wihascaryo. “Evaluasi Penerapan Perencanaan Kas Di Tingkat Satuan Kerja.” *Jakarta: Sub Bagian Pengembangan Sekretariat Direktorat Jenderal perbendaharaan* (2011).

Ikhsan, Arfan. “Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi Dan Manajemen.” Citapustaka Media, 2014.

- Ikhsan, Arfan, Muhammad Yamin Noch, Azizul Kholis, Hamdani, and Junita Putri Rajana. *Akuntansi Sektor Publik*. Medan: Madenatera, 2018.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Bil Hadis*. Bandung: Cordoba, 2019.
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Makro Islam*. Cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kementerian Keuangan RI. "Reformasi Pengelolaan Kas Di Indonesia : Kas, Dari Administrasi Pengelolaan, Menuju Secara, Kas" (2014).
- Keuangan, Redaksi Media. *Realisasi Penyerapan Anggaran Capai 56,51 Persen*. Media Keuangan, 2011.
- Kuncoro, Egiastyo Dwi. "Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi Sipp Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Dinas Pu Prov." *Kaltim. E-Journal Administrasi Bisnis* 1, no. 4 (2013): 364–373.
- Kurniawan, Robert. *Analisis Regresi Dasar Dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Lannai, Darwis, and Asbi Amin². "Factors Affect Budget Absorption In Government Institutions Of South Sulawesi" Vol 3, No, no. 2 (2020): 113–119.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- Mastuti, Suharno & Kristanto. "Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran, Lingkungan Birokrasi, Komitmen Manajemen, Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran." *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 13, no. September (2017): 367–377.
- Mistar. "Serapan Anggaran Pemko Medan Baru 47 Persen." Accessed September 19, 2020. <https://www.mistar.id/medan/serapan-anggaran-pemko-medan-baru-47-persen/>.

Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, and Maulidah Rahmawati. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.

Pendidikan, Eurika. "Pengertian Uji Validitas Dan Reliabilitas Secara Empirik." Accessed September 11, 2020. <https://eurekapendidikan.com/pengertian-uji-validitas-dan-reliabilitas-empirik-teoritik>.

Perbendaharaan, Ditjen. *Hasil Monitoring Dan Evaluasi Hal-Hal Yang Mempengaruhi Dalam Penyerapan Anggaran*. Jakarta: Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, 2011.

Perbendaharaan, Kemenkeu RI Ditjen. "Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Serta Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2020." Accessed September 19, 2020. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/papuabarat/id/data-publikasi/berita-terbaru/2886-penyerahan-daftar-isian-pelaksanaan-anggaran-dipa-serta-daftar-alokasi-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-tkdd-tahun-anggaran-2020>.

Prayitno, Irwan. "Pentingnya Penyerapan Anggaran." Accessed September 19, 2020. <https://irwanprayitno.wordpress.com/2012/01/04/pentingnya-penyerapan-anggaran/>.

Ramdhani, Dadan, and Indi Zaenur Anisa. "Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten." *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu* 10, no. 1 (2017): 134–148.

Ratag, Wieske Anneleen, Anderson G. Kumenaung, and Daisy S.M. Engka. "Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Lingkungan Iniversitas Sam Ratulangi." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 20, no. 2 (2019): 1.

Rizwanto, Natak. "Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Analisis." *Artikel Ilmiah Mahasiswa* (2016).

Seftianova, Ratih, and Helmy Adam. "Pengaruh Kualitas DIPA Dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Satker Wilayah KPPN Malang." *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi* 4, no. 01 (2013): 4448.

Sinulingga, Sukaria. *Metodologi Penelitian*. Medan: USU Press, 2015.

Siregar, Syofian. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Siswantara, Totok. "Optimalisasi Penyerapan Anggaran." Accessed September 20, 2020. <https://investor.id/archive/optimalisasi-penyerapan-anggaran>.

SPAN, Online Monitoring. "Modul Perencanaan Kas/Renkas." Accessed September 22, 2020. <https://hai.kemenkeu.go.id/kb/articles/pdf/penjelasan-menu-modul-perencanaan-kas-renkas>.

Subagiyo, Muhrom Ali Rozai Lilik. "Optimalisasi Penyerapan Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Organisasi (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Boyolali)." *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia* 9, no. 1 (2015).

Sulianto. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006.

Supriyanto, Achmad Sani. "Metodologi Riset Manajemen Sumber Daya Manusia." UIN-maliki Press, 2010.

Suwiknyo, Dwi. *Tarbiyah Finansial*. Yogyakarta: Diva Press, 2009.

Suwito, Heru. "PENGARUH KUALITAS DIPA DAN AKURASI PERENCANAAN KAS TERHADAP KUALITAS PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATKER-SATKER DI WILAYAH KERJA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG." UNIVERSITAS LAMPUNG, 2017.

Syafina, Laylan. "Panduan Penelitian Kuantitatif Akuntansi." Medan: Febi Press,

2018.

Umar, Husein. “Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis Edisi Kedua.”

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada (2008).

Widodo, Rudy. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akurasi Perencanaan Kas

Keluar (Rencana Penarikan Dana Harian) Tingkat Satuan Kerja.” *Jurnal*

Sumber Daya Aparatur 1, no. 1 (2019).

Wikipedia. “Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.” Accessed September 21, 2020.

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Isian_Pelaksanaan_Anggaran.

Yafiz, Muhammad, Muhammad Arif, and Aqwa Naser Daulay. *Pengantar Ilmu*

Ekonomi. Medan: Febi Press UINSU, 2016.

Yulyadi, Lili. “BOOK REVIEW: VIABILITY OF THE ISLAMIC GOLD

DINAR.” *Isefid Review* 1, no. 1 (2002): 88–96.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Kuisisioner Penelitian

PENGARUH KUALITAS DIPA (DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN) DAN AKURASI PERENCANAAN KAS TERHADAP KUALITAS PENYERAPAN ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN

Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari agar sudi kiranya memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuisisioner ini. Informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berikan merupakan bantuan yang sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian skripsi saya. Dan saya menjamin serta bertanggung jawab atas informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berikan adalah untuk kepentingan akademis semata. Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berikan, saya ucapkan Terima Kasih.

(M. Ilham Kholid)

Petunjuk Pengisian

Cara pengisian kuisisioner ini adalah dengan memilih salah satu jawaban yang sesuai menurut Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk masing-masing pertanyaan yang tersedia pada lembaran daftar kuisisioner. Bapak/Ibu/Saudara/Saudari cukup memberikan tanda centang (✓) pada kolom kode jawaban yang tersedia yaitu : SS, S, N, TS, dan STS. Adapun skor untuk masing-masing jawaban adalah sebagai berikut :

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2 = Tidak Setuju (TS)

Skor 3 = Netral (N)

Skor 4 = Setuju (S)

Skor 5 = Sangat Setuju (SS)

IDENTITAS RESPONDEN

Berikut ini terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Identitas Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, mohon dilengkapi dengan mengisititik-titik dan memberi tanda silang pada pilihan jawaban yang tersedia.

Nama Responden :

Umur Responden : Tahun

Jenis kelamin :

Pekerjaan :

Jabatan :

Lama menduduki jabatan ini : Tahun

Pendidikan terakhir : ☐ SMA ☐ D3 ☐ S3
☐ S1 ☐ S2

DAFTAR PERTANYAAN KUISIONER

1. KUALITAS DIPA (DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN) (X1)

No	Pertanyaan	Penilaian				
		SS	S	N	TS	STS
		(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1	Apabila terjadi revisi DIPA, tidak menjadi penyebab keterlambatan dalam penetapannya.					
2	Dalam penyusunan anggaran, tidak terjadi salah penentuan akun DIPA.					
3	Dalam pelaksanaan anggaran BPKAD Kota Medan mengacu kepada DIPA dan yang telah disahkan.					
4	Dokumen DIPA digunakan sebagai acuan dalam penyediaan dana.					
5	BPKAD Kota Medan dalam pelaksanaan anggaran telah mengikuti prosedur dalam pelaksanaan pendapat dan belanja sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen DIPA.					
6	DIPA mudah dipahami oleh pejabat/pegawai					
7	DIPA perlu direvisi karena tidak sesuai kebutuhan.					

Sumber : Ria Vinola Desi Imansari, 2020. Pengaruh Kualitas DIPA, Akurasi Perencanaan Kas, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah.

2. AKURASI PERENCANAAN KAS (X2)

No	Pertanyaan	Penilaian				
		SS	S	N	TS	STS
		(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1	Dalam membuat perencanaan kas melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan program.					
2	Perencanaan kas didukung dengan data yang valid berhubung dengan program yang bersangkutan.					
3	Proses perencanaan kas sesuai dengan prosedur yang ada.					
4	Perencanaan kas mengakomodir semua kebutuhan program/kegiatan.					
5	Perencanaan kas dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan program/kegiatan berdasarkan peraturan yang berlaku.					
6	Akurasi perencanaan kas perlu disiapkan agar keseimbangan dana yang dibutuhkan dapat terjaga.					
7	Tingkat akurasi perencanaan kas sangat dipengaruhi oleh kecermatan pembuatan perkiraan penyetoran dan perkiraan pembayaran.					

Sumber : Ria Vinola Desi Imansari, 2020. Pengaruh Kualitas DIPA, Akurasi Perencanaan Kas, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah.

3. KUALITAS PENYERAPAN ANGGARAN (Y)

No	Pertanyaan	Penilaian				
		SS	S	N	TS	STS
		(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1	Penyerapan anggaran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.					
2	Anggaran yang terealisasi di BPKAD Kota Medan, mencapai target penyerapan sesuai yang telah ditetapkan.					
3	Capaian realisasi anggaran setiap triwulan, mencapai target proporsional sebesar 25%.					
4	Penyerapan anggaran tidak mengalami penumpukan di akhir tahun.					
5	Evaluasi kinerja penyerapan belanja anggaran di BPKAD Kota Medan, dilakukan dengan membandingkan antara pagu anggaran dan realisasinya.					
6	Pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen anggaran BPKAD Kota Medan dilakukan sesuai jadwal.					
7	Dalam pelaksanaan anggaran telah mengikuti prosedur dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen DIPA dan Anggaran Kas.					

Sumber : Ria Vinola Desi Imansari, 2020. Pengaruh Kualitas DIPA, Akurasi Perencanaan Kas, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah.

LAMPIRAN II

Tabel F, Tabel t, dan Tabel R

1. Tabel F

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98

34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80

79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78

2. Tabel t

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500

27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688
Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733

73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

3. Tabel R

N	The Level of Significance		N	The Level of Significance	
	5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	38	0.320	0.413
4	0.950	0.990	39	0.316	0.408
5	0.878	0.959	40	0.312	0.403
6	0.811	0.917	41	0.308	0.398
7	0.754	0.874	42	0.304	0.393
8	0.707	0.834	43	0.301	0.389
9	0.666	0.798	44	0.297	0.384
10	0.632	0.765	45	0.294	0.380
11	0.602	0.735	46	0.291	0.376
12	0.576	0.708	47	0.288	0.372
13	0.553	0.684	48	0.284	0.368
14	0.532	0.661	49	0.281	0.364
15	0.514	0.641	50	0.279	0.361
16	0.497	0.623	55	0.266	0.345
17	0.482	0.606	60	0.254	0.330
18	0.468	0.590	65	0.244	0.317
19	0.456	0.575	70	0.235	0.306
20	0.444	0.561	75	0.227	0.296
21	0.433	0.549	80	0.220	0.286
22	0.432	0.537	85	0.213	0.278
23	0.413	0.526	90	0.207	0.267
24	0.404	0.515	95	0.202	0.263
25	0.396	0.505	100	0.195	0.256

26	0.388	0.496	125	0.176	0.230
27	0.381	0.487	150	0.159	0.210
28	0.374	0.478	175	0.148	0.194
29	0.367	0.470	200	0.138	0.181
30	0.361	0.463	300	0.113	0.148
31	0.355	0.456	400	0.098	0.128
32	0.349	0.449	500	0.088	0.115
33	0.344	0.442	600	0.080	0.105
34	0.339	0.436	700	0.074	0.097
35	0.334	0.430	800	0.070	0.091
36	0.329	0.424	900	0.065	0.086
37	0.325	0.418	1000	0.062	0.081

LAMPIRAN III

Hasil Uji SPSS

Frekuensi Data Berdasarkan Identitas

Statistics					
		Jenis Kelamin	Pendidikan	Divisi Bagian Pekerjaan	Usia
N	Valid	80	80	80	80
	Missing	0	0	0	0

Uji Validitas

1. Variabel Kualitas DIPA (X1)

Correlations									
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Jumla h	
P1	Pearson Correlation	1	,712**	,576**	,550**	,489**	,723**	,738**	,910* *
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
P2	Pearson Correlation	,712**	1	,504**	,468**	,261* *	,537**	,548**	,768* *
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,019	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
P3	Pearson Correlation	,576**	,504**	1	,676**	,280* *	,466**	,356**	,719* *
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,012	,000	,001	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
P4	Pearson Correlation	,550**	,468**	,676**	1	,390**	,555**	,384**	,746* *
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80

P5	Pearson Correlation	,489**	,261*	,280*	,390**	1	,372**	,330**	,552*
	Sig. (2-tailed)	,000	,019	,012	,000		,001	,003	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
P6	Pearson Correlation	,723**	,537**	,466**	,555**	,372**	1	,665**	,832*
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,001		,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
P7	Pearson Correlation	,738**	,548**	,356**	,384**	,330**	,665**	1	,772*
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000	,003	,000		,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
Ju ml ah	Pearson Correlation	,910**	,768**	,719**	,746**	,552**	,832**	,772**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	80	80	80	80	80	80	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Variabel Akurasi Perencanaan Kas (X2)

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Jumlah
P1	Pearson Correlation	1	,654**	,487**	,515**	,437**	,651**	,439**	,790**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
P2	Pearson Correlation	,654**	1	,491**	,416**	,638**	,577**	,304**	,779**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,006	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
P3	Pearson Correlation	,487**	,491**	1	,547**	,598**	,365**	,410**	,737**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,001	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
P4	Pearson Correlation	,515**	,416**	,547**	1	,583**	,490**	,480**	,757**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
P5	Pearson Correlation	,437**	,638**	,598**	,583**	1	,416**	,486**	,795**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
P6	Pearson Correlation	,651**	,577**	,365**	,490**	,416**	1	,374**	,733**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000	,000		,001	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
P7	Pearson Correlation	,439**	,304**	,410**	,480**	,486**	,374**	1	,672**
	Sig. (2-tailed)	,000	,006	,000	,000	,000	,001		,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80

	Pearson	,790**	,779**	,737**	,757**	,795**	,733**	,672**	1
Jumlah	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	80	80	80	80	80	80	80	80

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Variabel Kualitas Penyerapan Anggaran (Y)

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Jumlah
P1	Pearson	1	,524**	,403**	,400**	,035	,292**	,225*	,732**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,759	,008	,045	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
P2	Pearson	,524**	1	,490**	,199	,063	,161	,134	,644**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,076	,576	,154	,236	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
P3	Pearson	,403**	,490**	1	,584**	,090	,171	,289**	,754**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,425	,130	,009	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
P4	Pearson	,400**	,199	,584**	1	,173	,123	,192	,673**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	,000	,076	,000		,126	,278	,088	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
P5	Pearson	,035	,063	,090	,173	1	,428**	,364**	,394**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	,759	,576	,425	,126		,000	,001	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
P6	Pearson	,292**	,161	,171	,123	,428**	1	,519**	,532**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	,008	,154	,130	,278	,000		,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
P7	Pearson	,225*	,134	,289**	,192	,364**	,519**	1	,539**
	Correlation								

Jumlah	Sig. (2-tailed)	,045	,236	,009	,088	,001	,000		,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
	Pearson Correlation	,732**	,644**	,754**	,673**	,394**	,532**	,539**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	80	80	80	80	80	80	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-Laki	39	48,8	48,8	48,8
Valid Perempuan	41	51,2	51,2	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SMA	6	7,5	7,5	7,5
D3	13	16,3	16,3	23,8
Valid S1	52	65,0	65,0	88,8
S2	9	11,3	11,3	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Divisi Bagian Pekerjaan

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Kepala BPKAD	1	1,3	1,3	1,3
Sekretaris BPKAD	1	1,3	1,3	2,5
Sub Bagian Umum	8	10,0	10,0	12,5
Sub Bagian Penyusunan Program	4	5,0	5,0	17,5
Sub Bidang Anggaran (Belanja Tidak Langsung)	9	11,3	11,3	28,7
Sub Bidang Anggaran (Belanja Langsung)	7	8,8	8,8	37,5
Sub Bidang Perbendaharaan	1	1,3	1,3	38,8
Sub Bidang Belanja	8	10,0	10,0	48,8
Sub Bidang Fasilitasi Gaji	6	7,5	7,5	56,3
Valid Sub Bidang Kas	16	20,0	20,0	76,3
Sub Bidang Akuntansi	1	1,3	1,3	77,5
Sub Bidang Pembukuan	4	5,0	5,0	82,5
Sub Bidang Pelaporan	5	6,3	6,3	88,8
Sub Bidang Aset dan Investasi	1	1,3	1,3	90,0
Sub Bidang Pendataan dan Inventarisasi	3	3,8	3,8	93,8
Sub Bidang Pembiayaan dan Investasi	2	2,5	2,5	96,3
Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan	3	3,8	3,8	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)	80	27,00	35,00	33,2000	2,40990
Akurasi Perencanaan Kas	80	26,00	35,00	32,4000	2,72634
Kualitas Penyerapan Anggaran	80	23,00	35,00	30,2125	2,98390
Valid N (listwise)	80				

Hasil Uji Reliabilitas Kualitas DIPA

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,880	7

Hasil Uji Reliabilitas Akurasi Perencanaan Kas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,870	7

Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Penyerapan Anggaran

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,730	7

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,43923955
	Absolute	,098
Most Extreme Differences	Positive	,047
	Negative	-,098
Kolmogorov-Smirnov Z		,879
Asymp. Sig. (2-tailed)		,423

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7,538	3,854		1,956	,054		
	Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)	,282	,198	,228	1,425	,158	,340	2,939
	Akurasi Perencanaan Kas	,411	,175	,376	2,352	,021	,340	2,939

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	7,538	3,854		1,956	,054		
1 Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)	,282	,198	,228	1,425	,158	,340	2,939
Akurasi Perencanaan Kas	,411	,175	,376	2,352	,021	,340	2,939

Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	7,538	3,854		1,956	,054		
1 Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)	,282	,198	,228	1,425	,158	,340	2,939
Akurasi Perencanaan Kas	,411	,175	,376	2,352	,021	,340	2,939

Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	233,346	2	116,673	19,113	,000 ^b
	Residual	470,041	77	6,104		
	Total	703,388	79			

Uji Model R²

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,576 ^a	,332	,314	2,471

LAMPIRAN IV

Hasil Jawaban Responden

No. Responden	Kualitas DIPA (X1)	Akurasi Perencanaan Kas (X2)	Kualitas Penyerapan Anggaran (Y)
1	30	30	27
2	30	30	27
3	31	28	28
4	28	29	31
5	32	28	28
6	32	28	26
7	31	30	29
8	28	29	28
9	31	29	29
10	27	31	29
11	31	31	29
12	28	31	30
13	30	28	29
14	30	29	28
15	30	30	28
16	30	29	27
17	31	29	29
18	31	29	30
19	31	30	28
20	32	30	29
21	30	29	30
22	31	30	29
23	31	30	29
24	28	29	24
25	29	28	24
26	31	27	25
27	30	26	24
28	35	35	28
29	35	32	30
30	35	35	31
31	35	35	29
32	35	35	29
33	35	33	27
34	35	35	27
35	35	32	23

36	35	35	31
37	35	33	30
38	34	32	31
39	35	34	34
40	35	35	32
41	35	35	30
42	35	35	27
43	35	35	32
44	34	33	26
45	35	35	28
46	35	35	31
47	35	35	33
48	35	35	35
49	35	32	33
50	35	35	35
51	35	32	31
52	35	35	31
53	35	35	30
54	35	35	31
55	34	32	30
56	35	35	32
57	35	35	32
58	35	35	32
59	35	35	31
60	35	35	31
61	35	35	34
62	35	35	35
63	35	35	35
64	35	35	35
65	35	35	32
66	35	35	28
67	35	33	34
68	35	33	33
69	34	35	28
70	35	35	33
71	35	33	35
72	35	28	33
73	35	33	33
74	35	35	34
75	34	35	35
76	35	33	34

77	35	35	33
78	34	34	34
79	33	33	34
80	30	30	28

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : M. Ilham Kholid
2. NIM : 0502173460
3. TTL : Medan, 02 Februari 1999
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Jl. Selamat Gg. 45 No. 67, Kel. Binjai, Kec. Medan Denai
Kota Medan, Sumatera Utara.

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Perguruan Islam Teladan Berijazah Tahun 2011
2. Tamatan Mts Al-Ittihadiyah Berijazah Tahun 2014
3. Tamatan SMK Swasta Swadaya Berijazah Tahun 2017
4. Tamatan S1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2021

III. RIWAYAT ORGANISASI & PENGALAMAN KEGIATAN

1. Anggota Diklat Teater Lembaga Kreativitas Seni Mahasiswa (LKSM) UIN-SU (2018).
2. Head Of Vocabulary Division Economic English Arabic Rabbani (E2AR) FEBI UIN-SU (2018-2019).
3. Sekretaris Language Expo (2019)
4. Staff Infokom Economic English Arabic Rabbani (E2AR) FEBI UIN-SU (2019-2020).
5. Anggota Bidang Kesenian IKAMMI (Ikatan Mahasiswa Minang) UIN-SU (2019-2020).
6. Anggota Bidang Kewirausahaan Generasi Baru Indonesia (GenBI) Komisariat UIN-SU (2020-2021).
7. Relawan Pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumut I (2018).
8. Freelance Bidang Anggaran BPKAD Kota Medan (2019).